

**SKRIPSI**

**MODEL *PARTICIPATORY GOVERNANCE* (PERUMUSAN  
KEBIJAKAN ADAT BISSU SEGERI KABUPATEN PANGKEP)**

Disusun dan diusulkan oleh :

HASRIATI

Nomor Stambuk : 1056 105337 15



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**MODEL PARTICIPATORY GOVERNANCE (PERUMUSAN  
KEBIJAKAN ADAT BISSU SEGERI KABUPATEN PANGKEP)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

**Disusun dan diusulkan oleh :**

**HASRIATI**

**Nomor Stambuk :**

**1056 105337 15**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : Model *Partisipatori Governance* (Perumusan  
Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)  
Nama Lengkap : Hasriati  
Nomor Stambuk : 105610533715  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Tahir, M.Si.

  
Dr. Rutinawaty Kasmud, S.Sos., M.Si.

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. Hj. Bryan Malik, S.Sos., M.Si.

  
Nasrul Haq, S.Sos. M.PA.

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0005/FSP/A.4-II/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2019.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasriati

Nim : 105610533715

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini dengan judul: *Model Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 September 2019

Yang Menyatakan



HASRIATI

## ABSTRAK

**HASRIATI. Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)** (Dibimbing Oleh Muhammad Tahir Dan Rulinawaty Kasmad)

*Participatory Governance* berfokus pada pendalaman keterlibatan demokratis dengan melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan *good governance*. Akan tetapi hal ini tidak diterapkan di Kabupaten Pangkep yang melibatkan masyarakat marginal bissu dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model *participatory governance* (perumusan kebijakan adat bissu Segeri Kabupaten Pangkep). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan tipe fenomenologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (a) Tidak adanya kebijakan yang berhubungan dengan bissu dan pelibatan para bissu. Bissu pada zaman dulu yang dihormati oleh masyarakat dan segala kebutuhan diberikan oleh kerajaan. Berbeda halnya dengan bissu zaman sekarang yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan sawah arajang telah diambil alih oleh pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan berkurangnya minat para bissu untuk tetap beratraksi dalam berbagai kegiatan kebudayaan; (b) Pemerintah menyadari bahwa bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk tetap melestarikan kebudayaan ini seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin terkikisnya budaya bissu(c) Dari segi keterlibatan masyarakat marginal dalam proses meningkatkan efisiensi dan pengelolaan layanan publik dapat dikatakan masih kurang hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebudayaan yang dimiliki dan hanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu untuk beberapa kepentingan dalam agenda pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan antar Kabupaten dan Provinsi. Budaya bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep. Seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin terkikisnya budaya bissu dan terjadinya penjualan kebudayaan hal ini dikarenakan kurangnya perhatian para aparat pemerintah dalam melestarikan kebudayaan ini.

**Kata Kunci:** *participatory governance*, perumusan kebijakan, adat bissu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahna, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep ”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku rektor serta jajaran pimpinan kampus Unismuh Makassar. Serta tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Malwani dan Haslinda selaku Ayahanda dan Ibunda dari penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak ternilai, baik moral maupun materi, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga demi menyekolahkan penulis agar bisa meraih prestasi dan cita-cita yang diinginkan.
2. Arifuddin dan Rabiah selaku orang tua kedua dari penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak ternilai, baik moral maupun materi, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga demi menyekolahkan penulis agar bisa meraih prestasi dan cita-cita yang diinginkan.
3. Dr.Muhammad Tahir, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Abdul Mahsyar, M.Si yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat akademik demi terciptanya prestasi yang baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmu, dorongan dan semangat kepada penulis.
8. Lembaga tercinta LKIM-PENA yang sangat berperan penting dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
9. Teman-teman Angkatan X LKIM-PENA yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
10. Marwiati Ulafa dan Ahmad yang selaku Tim researcher comunity LKIM-PENA yang membantu dalam melakukan penelitian ini.
11. Saudariku Erni yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
12. Bunda Eka sekeluarga dan Saudari saya Nurul Fadila yang selalu membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini selama dilokasi penelitian.
13. Kakanda Yayuk Basuki, kakanda Sukmawati dan kakanda Riska yang selalu memberikan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Brengos' squad yang selalu menyemangati, memotivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
15. Adinda-adinda Diklat Ilmiah 13 LKIM-PENA yang memberikan bantuan selama proses penelitian

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang dibutuhkan.

Makassar, 30 September 2019



HASRIATI



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENERRIMAAN TIM .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Participatory Governsnce</i> .....	8
B. Kebijakan Publik .....	10
C. Adat Bissu.....	18
D. Perumusan Model Kebijakan .....	21
E. Kerangka Pikir .....	26
F. Fokus Penelitian .....	27
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Informan Penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data.....	32

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Obyek Penelitian ..... 34

B. Model Participatory Governance  
(Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) ..... 40

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....71

B. Saran .....72

DAFTAR PUSTAKA .....73

LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	27
4.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep .....	38



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Deskripsi Model <i>Participatory Governance</i> (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) Kompetensi Orientasi Praktis.....	42
Tabel 2. Deskripsi Model <i>Participatory Governance</i> (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) Kompetensi Partisipasi <i>Button Up</i> .....	56
Tabel 3. Deskripsi Model <i>Participatory Governance</i> (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) Kompetensi Konsep Permusyawaratan .....	61



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien berdasarkan pada kebutuhan masyarakat sebagai bentuk kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap Warga Negara dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber daya yang tersedia demi terwujudnya tujuan Negara Republik Indonesia dengan maksimal. Hal utama yang menjadi perhatian pemrakarsa kebijakan ditujukan pada sejauh manakah tujuan atau sasaran resmi kebijakan yang telah tercapai (Febriyandi, 2015).

Penyelenggaraan pemerintah partisipatif dalam mewujudkan *good governance* melalui partisipasi publik merupakan suatu keniscayaan yang didasarkan pada teori demokrasi secara lebih umum yang menawarkan teori dan praktik keterlibatan publik dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintah melalui proses memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber daya yang tersedia. Dengan adanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor dari keberhasilan otonomi daerah, namun kenyataan yang terjadi menunjukkan kondisi setiap daerah masih banyak penyelenggara dan pelaksana unit kegiatan publik tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan publik (Nitbani, 2016).

*Participatory Governance* diidentifikasi sebagai sebuah praktek kehidupan demokrasi moderen yang diselenggarakan secara profesional dan fokus kepada proses perumusan kebijakan yang dilakukan secara kolektif, yang dilakukan oleh

aktor yang bersifat flural atau terdiri dari berbagai *stake holders* seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Perumusan yang dilakukan melalui proses dan sistem *participatory governance* yang melibatkan masyarakat marjinal dalam proses penyelenggaraan negara akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya berbagai keputusan mengenai tata kehidupan masyarakat yang diinginkan untuk melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam urusan publik melalui forum-forum terbuka seperti, media massa, *public hearing*, forum warga, dan forum masyarakat luas dilaksanakan melalui proses bersama dengan berbagai *stakeholders* yang terkait dengan kebijakan tersebut khususnya masyarakat marjinal yang akan memberikan informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan public (Titiswasanany, 2013).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang telah lahir atas pertimbangan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara termasuk badan publik lainnya (UU No 14 Tahun 2008) kemudian hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 04 Tahun 2007 tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah (PERMENPAN No. 04 Tahun 2007). Dengan demikian penetapan peraturan tersebut seharusnya menjadi landasan utama bagi setiap daerah untuk membuat sebuah jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan di masyarakat biasanya jarang terjadi. Pihak eksekutif maupun legislatif umumnya jarang memberikan ruang bagi publik untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Demikian pula dengan yang terjadi dipemerintahan daerah. Keterlibatan pemerintah daerah atas masukan dan pendapat publik dalam penyusunan kebijakan daerah belum disediakan mekanisme yang jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat hanya memiliki sarana komunikasi guna memberi masukan kepada pemerintah daerah melalui sarana media massa. Akan tetapi hal tersebut belum memberi peluang bagi masyarakat untuk didengar atau diperhatikan mengenai masukan atau pendapat masyarakat akan suatu kebijakan, bahkan hal akan lebih tidak efektif karena tidak adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk memperhatikan sama sekali (Yasir & Ridlwan, 2012).

Berdasarkan hasil laporan Ombudsman Republik Indonesia mengenai hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, berdasarkan hasil survei yang dilakukan kenyataan yang terjadi menunjukkan 78,41% dari 2.000 penyelenggara dan pelaksana unit layanan publik tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara (Nitbani, 2016).

Perumusan kebijakan dilakukan dengan melalui sebuah proses yang melibatkan berbagai faktor khususnya faktor budaya. Proses perumusan kebijakan pelestarian kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan yang melibatkan peran aktor-aktor menjadi hal penting dalam upaya membuat suatu kebijakan

pemerintahan partisipatif agar masyarakat adat mendapat perhatian dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka seperti pelestarian kebudayaan yang harus tetap dijaga dalam memberdayakan kebudayaan (BPNB Sulsel, 2017).

Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya yang tersebar diseluruh wilayahnya, yang merupakan jenis kebudayaan dan bentuk pelestarian yang berbeda-beda. Untuk mempertahankan sesuatu yang dimiliki, Pemerintah Indonesia melakukan pengembangan dan pelestarian dengan memanfaatkan kebudayaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan asas desentralisasi. Asas desentralisasi atau yang diketahui dengan penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom. Asas desentralisasi yang dianut Indonesia yang dimaksudkan dengan tujuan mempercepat proses pembangunan dan pemerataan di berbagai daerah. (Nilam, 2015).

Salah satu kebudayaan yang memerlukan pelestarian dan perhatian dari pemerintah adalah kebudayaan adat Bissu. Etnis bugis yang bermayoritas sebagian besar penghuni pesisir bagian selatan yang berada di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, termasuk dalam kategori kebudayaan daerah yang memiliki nilai-nilai kesenian yang disuguhkan oleh Bissu melalui proses upacara adat yang disertai dengan atraksi yang dimiliki oleh setiap aktivitas ritual yang dilakukan, menjadi pelengkap khazanah budaya etnis bugis yang dikenal sebagai pewaris jiwa bahari nusantara ini (BPNB Sulsel, 2017).

Salah satu kebudayaan yang memerlukan pelestarian dan perhatian dari pemerintah adalah kebudayaan adat Bissu. Etnis bugis yang bermayoritas sebagian besar penghuni pesisir bagian selatan yang berada di Provinsi Sulawesi



Selatan, termasuk dalam kategori kebudayaan daerah Masyarakat. Bissu adalah *calabai*, tapi tidak semua *calabai* adalah bissu. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan Bugis Kuno, ada lima jenis gender dalam kehidupan sosial yaitu perempuan (*makunrai*), laki-laki (*uroane*), perempuan berpenampilan laki-laki (*calalai*), dan laki-laki berpenampilan perempuan (*calabai*) dan bissu merupakan gender terakhir dari kelima gender tersebut

Bissu memegang peran penting dalam setiap seremoni ritual adat di kerajaan karena mereka bertugas sebagai pelayan raja, dan juga sebagai pengabdikan masyarakat. Bissu memiliki kelebihan dengan kekuatan yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain dan bissu merupakan laki-laki tulin yang berpenampilan wanita, terlebih saat melakukan atraksi kebudayaan. Hal inilah yang merupakan salah satu daerah yang membedakan dengan daerah lain yang mempunyai keunikan tersendiri terhadap daerah lain karena adatnya (Ancha, Djaya, 2017).

Berdasarkan pada masalah penelitian ini maka penulis melakukan penelitian mengenai *Participatory Governance* dengan judul “**Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana orientasi praktis pemerintahan partisipatif pada implementasi perumusan kebijakan masyarakat adat bissu Segeri Pangkep?
2. Bagaimana partisipasi botton up pada pemerintahan partisipatif pada implementasi kebijakan perumusan kebijakan masyarakat adat bissu Segeri Pangkep?
3. Bagaimana konsep permusyawaratan pada pemerintah partisipatif pada implementasi kebijakan perumusan kebijakan masyarakat adat bissu Segeri Pangkep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui orientasi praktis pemerintahan partisipatif pada implementasi perumusan kebijakan masyarakat adat bissu Segeri Pangkep.
2. untuk mengetahui partisipasi botton up pada pemerintahan partisipatif pada implementasi kebijakan perumusan kebijakan masyarakat adat bissu Segeri Pangkep.
3. untuk mengetahui konsep permusyawaratan pada pemerintah partisipatif pada implementasi kebijakan perumusan kebijakan masyarakat adat bissu Segeri Pangkep.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan untuk penelitian selanjutnya terkait
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai media referensi dalam melakukan penelitian mengenai

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan kebudayaan bissu yang ada di Sulawesi Selatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui lebih dalam kebudayaan yang harus tetap dilestarikan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah sebagai arahan dalam inovasi untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Participatory governance***

Istilah partisipasi pada umumnya memiliki arti yang sama dengan peran serta, yaitu mengambil bagian yang sama atau peran di dalam pengambilan keputusan terhadap tiga tahap yaitu; (1) partisipasi dalam perencanaan (partisipasi dalam pelaksanaan dan (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Antara ketiga tahap yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya ialah partisipasi pada tahap perencanaan hal ini dikarenakan masyarakat sekaligus berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan.

Konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Partisipasi pemerintahan didasarkan pada teori demokrasi partisipatif secara lebih umum, yang tidak hanya menawarkan teori akan tetapi disertai dengan praktik dari pelibatan publik melalui proses deliberatif. Partisipasi demokrasi dianggap sebagai kebijakan politik yang dibuat untuk dirinya sendiri. Akan tetapi pemerintah partisipatif menolak dan menawarkan lebih banyak lagi.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efisiensi program dalam penggunaan sumber daya (Fischer, 2010).

Pemerintah partisipatif berfokus pada pendalaman keterlibatan demokratis dengan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah partisipatif menunjukkan bahwa dalam pemerintahan aktor dan stakeholders lain yang berasal dari non pemerintahan yang diberdayakan untuk menggunakan sumber daya dari negara untuk menghasilkan sebuah keputusan mengenai hal-hal yang secara langsung menjadi perhatian mereka (Wampler & McNulty, 2011).

Literatur tentang teori dan tata kelola partisipatif mengasumsikan bahwa musyawarah adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang efektif. Musyawarah atau diskusi terbuka, kritik, debat maupun perbedaan pendapat merupakan peran utama dalam proses pembangunan: partisipatif pemerintah adalah tujuan langsung yang dihasilkan dari dirinya sendiri dan peran instrumental dengan mengomunikasikan kebutuhan rakyat (Le Roux, 2009).

Elemen pokok dalam mewujudkan *good governance* adalah keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik. Keikutsertaan masyarakat menjadi pilar utama dari negara demokrasi. Dalam negara demokrasi masyarakatlah yang berdaulat sehingga sangat tepat jika sistem pemerintahan demokrasi menjaikan partisipasi masyarakat menjadi suatu keniscayaan (Muhammadiyah, 2013).

## **B. Kebijakan Publik**

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses perencanaan suatu aksi atau keputusan untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai suatu proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan adalah faktor penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya yang dibentuk bukan untuk kepentingan politis akan tetapi ditujukan bagi peningkatan pelayanan publik (Wahab, 2012).

Wahab, 2012 mengatakan bahwa kebijakan publik ialah antara hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Perumusan kebijakan publik sebagai aksi atau tindakan pemerintah mengenai suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi, langkah-langkah yang diambil ataupun mengalami kegagalan dalam proses pengimplementasian, dan penjelasan yang diberikan mengenai hal yang terjadi ataupun tidak terjadi.

Definisi lain, yang tidak kalah luas dari dua definisi yang telah disebutkan sebelumnya adalah definisi yang dikemukakan oleh (Winarno, 2012) Kebijakan dapat berasal seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat suatu rangkaian program/ aktivitas ataupun tindakan dengan tujuan tertentu yang dibuktikan dengan para pelaku atau (stakeholders) dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut (Wahab, 2010) menyatakan bahwa:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah kepada pencapaian suatu tujuan dibandingkan dengan sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;

2. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling memiliki keterkaitan dan pola tertentu yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
3. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan teratur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
4. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, akan dapat dipahami dengan lebih baik lagi, apabila kebijakan itu kita perinci lebih lanjut ke dalam beberapa kategori seperti berikut ini (Wahab, 2012).

1. Tuntutan kebijakan; Tuntutan kebijakan yang dimaksud di sini ialah tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh bergai stakeholder seperti swasta maupun kalangan dalam pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan berbagai tindakan tertentu, atau sebaliknya, untuk tidak melakukan suatu hal terhadap suatu permasalahan. Tuntutan-tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari berbagai desakan umum agar pemerintah melakukan suatu tindakan hingga usulan dalam mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Keputusan kebijakan; Keputusan kebijakan Yang dimaksud di sini ialah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemerintah untuk memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hubungan ini, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), mengeluarkan perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden), ketetapan-ketetapan, mencanangkan peraturan-peraturan administratif, semisal peraturan tentang disiplin bagi kalangan pegawai negeri sipil, atau membuat penafsiran terhadap undang-undang, seperti yang acapkali dilakukan oleh mahkamah konstitusi.
3. Pernyataan kebijakan; Pernyataan kebijakan yang dimaksud di sini ialah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan publik tertentu. Termasuk ketetapan-ketetapan MPR, keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, peraturan-peraturan administratif, keputusan-keputusan peradilan, maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato resmi para pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah, serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
4. Keluaran kebijakan; Keluaran kebijakan ini merupakan wujud kebijakan publik yang agak paling konkret. Artinya, ia dapat dilihat dan manfaatnya dapat dirasakan di kalangan masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang dilakukan dalam merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keluaran-keluaran kebijakan ini



menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah, yang harus kita bedakan dari apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5. Hasil akhir kebijakan; Hasil akhir kebijakan yang dimaksud di sini adalah akibat-akibat atau dampak (langsung) yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sebagai konsekuensi logis dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat

Kajian kebijakan publik merupakan studi yang kompleks karena pelaksanaan suatu kebijakan publik harus melalui sejumlah tahapan, hal ini sesuai pendapat (Sirajuddin, 2014) yaitu:

1. Proses mengidentifikasi dan perumusan masalah publik;
2. Perumusan dan pengagendaaan suatu kebijakan;
3. Penganalisaan suatu kebijakan;
4. Pembuatan keputusan terhadap suatu kebijakan
5. Pengimplementasian dan pemantauan suatu kebijakan;
6. Pengevaluasian suatu kebijakan;
7. Pengkajian dampak dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

### **B. 1 Formulasi Kebijakan**

Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu proses dari berbagai tahapan pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Charles Lindblom dan beberapa ahli lainnya, dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang berperan

atau terlibat serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor yang resmi ataupun tidak resmi (Bintari, 2016).

Perumusan kebijakan adalah sebuah rangkaian pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan secara teoritis perumusan kebijakan adalah pengembangan alternatif pemecahan suatu masalah dan dalam proses perumusan kebijakan proses panjang yang memerlukan lobby dan komunikasi politik tingkat tinggi, sebagai sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah keputusan.

Tidak semua dari permasalahan publik yang telah dirumuskan dapat masuk dalam agenda kebijakan. Permasalahan-permasalahan tersebut saling berkompetensi satu sama lainnya. Hanyalah permasalahan-permasalahan tertentu yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan dengan harus memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus dilakukan dibandingkan dengan permasalahan lainnya. Proses pengimplementasian suatu kebijakan adalah proses perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik sering disebut sebagai inti dari kebijakan publik itu sendiri (Sirajuddin, 2014).

Pada fase ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik. Agenda yang disusun pemerintah menyangkut beberapa masalah pokok yaitu masalah rutinitas pemerintah, masalah dari masyarakat dan masalah baru dari masyarakat. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif (DPR),

kalangan eksekutif (Presiden dan para pembantunya), agen – agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah – masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

Dalam model elite tergambar jelas bagaimana kebijakan yang dihasilkan hampir dapat dipastikan bahwa kepentingan elite-elite yang berkuasa akan lebih mewarnai dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan publik. Karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh para elite-elite untuk menguntungkan dirinya dan mempertahankan kekuasaannya sehingga kebijakan yang dibuat akan menyingkirkan partisipasi publik akan lebih banyak muncul. Berbeda dengan kebijakan publik, menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memang berbasis paada *public chooces* (pilihan publik yang mayoritas). Model ini menjabarkan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik dengan membuka kesempatan yang lebih luas. Disisi lain semakin meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk bertumbuh, berdaya dan berkembang menjadi *civil society*. Masyarakat akan semakin paham akan hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan persoalan-persoalan publik (Yasir & Ridlwan, 2012).

## **B. 2 Implementasi Kebijakan**

Kata implementasi (*implementation*) menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan (suatu keputusan, peraturan daerah maupun undang-undang yang berlaku lainnya). Peran dari pelaksanaan implementasi sangat menentukan hasil terimplemenatsisnya dari suatu kebijakan sehingga pelaksanaan dari suatu implementasi kebijakan harus memahami kebijakan uang akan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu rangkaian dalam kebijakan publik yang sebagai penentu apakah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh publik ( Aneta, 2010).

Proses implementasi akan mulai dilaksanakan jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Implementasi kebijakan memiliki hubungan antara tujuan dari suatu kebijakan dengan realisasinya yang dari hasil kegiatan yang dilakukan pemerintah. implementasi memiliki tujuan dalam membangun sebuah jaringan yang dapat memudahkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan oleh instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya. Implementasi kebijakan sangat diperlukan sebagai tolak ukur kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan program (Akib, 2010).

Implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu;

1. tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini, implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.
2. Tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah”.

3. Tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Proses pengimplementasian kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pilihan, yaitu dengan langsung mengimplemnetasikan dalam bentuk program-program dan diimplemnetasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan publik. Sementara itu beberapa ahli memperkenalkan model implementasi kebijakan publik, yaitu; (1) model Donald Van Meter dengan carl Van Horn (1975), (2) Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). (3) Model Brian W Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978). (4) Model Grindle (1980). (5) Model Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan benny Hjem dan David O'poter (1981). (6) Model George C Edward III (1980).

Setelah memahami beberapa model implementasi kebijakan diatas diakui oleh (Nogroho, 2003) tidak ada model kebijakan yang terbaik, hal ini dikarenakan setiap setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi yang berlainan dan empat prinsip model kebijakan yang harusnya dipertimbangkan yaitu: Prinsip pertama 1) Ketepatan suatu kebijakan; 2) Perumusan kebijakan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan; 3) Apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga memiliki kewenangan. Prinsip ke dua adlah tepat pelaksanaan, ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana dari impelementasi kebijakan yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat. Prinsip ke tiga yaitu ketetapan target 1) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan; 2) Target dalam keadan siap untuk diintervensi; 3) diintervensi implemnetasi kebijakan bersifat baru atau sebuah pembahrauan. Prinsip ke empat

yaitu ketepatan lingkungan. Ada dua jenis lingkungan yang menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal (Sirajuddin, 2014).

### C. Adat Bissu

Bissu adalah salah satu etnis Bugis yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki keunikan dan tidak dimiliki oleh etnis lain. Salah satunya adalah tradisi yang berasal dari masa pra Islam dan masih berlangsung sampai sekarang yaitu keberadaan Bissu. Bissu memiliki keistimewaan seperti spesifikasi gendernya, yang tidak masuk dalam kategori laki-laki dan kategori perempuan.

Bissu dalam bahasa Bugis diartikan sebagai orang suci, yang berakar dari kata *bessi* atau suci. Bissu dikatakan suci karena mereka tidak haid, tidak berpayudara dan tidak berdarah. Sementara bissu yang digambarkan oleh Antropolog Petranis Matthes bahwa dinyatakan sumber kedataannya dari raja Luwu yaitu Batara Guru anak sulung dari raja agung di kayangan yang turun ke bumi (*To Manurung*). Dia turun dalam sebatang bambu dan tersaing dari penduduk kekurangan ini ditiutupi dengan bersatunya We Nyili Tomi, saudara perempuan dewa mereka yang bangkit dari lautan (Said, 2016).

Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, kehadiran bissu bersamaan dengan kehadiran suku Bugis. Dalam kitab *I La Galigo* disebutkan bahwa, keberadaan bissu berkaitan dengan cerita legenda tentang batara guru yang menjadi cikal bakal manusia Bugis turun dari “dunia atas” (*bottinglangi*) ke bumi atau dunia bawah (*bori’liung*) untuk menemui istrinya We Nyili Timo. Ketika batara guru turun ke bumi, ia disertai seorang Bissu yang bernama Lae-lae. Bissu ini membantu batara guru dalam mengatur kehidupan di bumi. Berkat bantuan

Bissu di bumitercipta aturan, norma dan etika masyarakat. Selain itu juga tercipta bahasa dan karya-karya budaya dan tradisi sebagai hasil kegiatan masyarakat.

Di masa lalu di bumi nusantara yang tertera dalam naskah La Galigo, warisan budaya tulis dari hikayat Bugis yang berkembang secara lisan sejak abad ke-13, mereka adalah kaum bissu. Bissu adalah sebuah istilah atau nama dari sebuah kebudayaan yang tergolong unik karena mereka adalah laki-laki tulen yang berpenampilan wanita dalam melakukan aktraki kebudayaan bugis kuno yang diyakini adalah sebagai para pengawal kerajaan dimasanya dan para menjaga benda-benda pusaka kerajaan yang menjadi aset. Benda pusaka yang dimaksud adalah bajak sawah yang panjangnya hingga 5 meter yang bertahan hingga saat ini, yang memiliki sejarah awal proses pertanian di tanah bugis.

Bissu memerankan peran sebagai dramaturgi dengan melihat konsep pementasan dengan penggelaran upacara keagamaan seorang 'Bissu' yang dianggap sebagai seorang pendeta agama bugis kuno sebelum munculnya agama islam. Bissu dianggap memiliki dua elemen gender yang dimiliki oleh manusia, yaitu laki-laki dan perempuan dan juga memiliki dua alam yaitu alam makhluk dan alam roh (Spirit). Puang matoa atau puang towa adalah seorang yang dijadikan sebagai ketua 'Bissu'. Secara biologis bissu diperankan oleh mayoritas laki-laki yang memiliki sifat perempuan, walaupun ada juga asli perempuan (Bahfiarti, 2011).

Sejak beberapa ribu tahun lalu, suku bugis yang mendiami kawasan Sulawesi Selatan. Bissu adalah sebutan bagi pemimpin ritual dari agama bugis kuno, sebelum agama islam masuk dan dianut oleh masyarakat. Kata Bissu, berasal dari kata bessi atau dalam bahasa bugis memiliki arti bersih dan ada pula

bissu yang menyatakan bahwa bissu berasal dari kata Bhiksu atau Pendeta Budha (Pelras, 2006: 68).

Berdasarkan kitab La Galigo, kitab rakyat bugis kuno, yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat berhubungan dengan penciptanya. Keadaan ini merupakan lara sang pencipta, sehingga ia pun menurunkan manusia tanpa kelamin yang jelas, yang ditugaskan dalam memimpin upacara adat. Pada masa pra islam Bissu merupakan golongan yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat bugis pada kala itu. Dipundak bissu inilah semua upacara keagamaan dibebankan, untuk dilaksanakan demi memuji sang pencipta. Upacara tradisionaldi Sulawesi Selatan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai memohon keselamatan dan perlindungan dari sang pencipta. Tugas dari diturunkan nya Bissu ini adalah sebagai batara guru yang diberikan tugas oleh batara guru untuk mengatur bumi (Bahfiarti, 2011).

Peran bissu pada masa kerajaan bugis kuno sangat besar dan bissu pada kala itu masuk dalam lingkungan birokrasi kerajaan. Para bissu diberi jabatan sebagai penasehat spiritual raja dan diberi kewenangan untuk melakukan penobatan kepada raja-raja. Selain itu bissu diberikan tugas sebagai pemangku adat dan sebagai pemimpin kepercayaan Bugis pra Islam. Peran Bissu sangat istimewa hal ini tampak dari namanya, yaitu Bissu berasal dari kata "*bessi*" yang berartikan bersih dalam arti yang luas. Ia tidak berdarah, suci, tidak mengalami menstruasi dan tidak menyusui. Dahulu bissu sangat dihormati oleh masyarkat karena bissu memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, tradisi, silsalah keluarga, kehidupan sosial di dunia dan kehidupan para dewata, menguasai pengobatan dan mistik (Syamsuddin, 2010: 5).



Pada masa-masa kerajaan masih Berjaya, komunitas bissu dapat ditemukan di hampir di semua daerah-daerah bugis di Sulawesi Selatan. Saat ini komunitas bissu yang masih bertahan dapat ditemukan di salah satu daerah yaitu di Segeri Kabupaten Pangkep. Jumlah bissu menurun drastis yang diakibatkan oleh beberapa hal. Perkembangan agama islam juga menjadi salah satu hal penyebab perubahan terhadap aktivitas bissu. Adanya tanggapan dari masyarakat bahwa bissu telah melakukan tradisi-tradisi yang melenceng dari agama hal. Banyak nya para bissu yang menjalankan syariaatnya sebagai seorang muslim dengan melakukan ibadah haji dan ibadah lainnya (Syahrul, 2013:96).

Seiring perkembangan zaman semakin sulitnya kehidupan para bissu karena *bola arajang*, sebagai tempat berkumpul semakin tidak layak untuk dihuni dan kepemilikannya beralih ke masyarakat. Demikian pula dengan *galung arajang* (sawah arajang) sebagai sumber penghidupan para bissu juga diambil alih oleh pemerintah dan masyarakat. Kehidupan bissu semakin suram ketika masa-masa selanjutnya kesulitan ekonomi dan ketiadaan pimpinan baru menyebabkan bissu mencari penghidupan masing-masing dan tinggal berpencar-pencar. Para bissu saat ini mencari nafkah dengan menjadi perias pengantin (*indobotting*), menyewakan peralatan dan perlengkapan pengantin, menjadi penjahit pakaian ada dan pengantin, menjadi petani serta pekerjaan lainnya (Suliyati, 2018).

#### **D. Perumusan Model Kebijakan Govanta J**

##### **D.1 Orientasi Praktis**

Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana melakukan dan melaksanakan pemerintah yang efektif dan efisien, yakni pemerintah yang dapat

membuat hasil yang baik bagi publik. Secara umum hadirnya sebuah kebijakan sebagai sistem standar, aturan dan prosedur dalam mewujudkan, menilai dengan kritis dan mensinergikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Serta melakukan pemecahan masalah dalam pemahaman kegiatan sedangkan variabel dari pemecahan masalah nya adalah dengan bentuk solusi yang ditawarkan sebagai kunci utama dalam menganalisis suatu kebijakan (Febriyandi, 2015).

Kebijakan publik selalu dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memecahkan persoalan-persoalan di tengah kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan kemudian diamanatkan untuk membuat kebijakan publik yang pro rakyat dan tepat sasaran. Namun, sayangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah banyak mengalami kegagalan pada proses implementasi kebijakan. Berbagai program kebijakan yang dirancang demokratisasi dalam proses formulasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik (Leo, 2008).

Mekanisme keterlibatan inilah yang penting untuk diatur dalam suatu peraturan legal format agar dalam prakteknya tidak lagi ada keraguan masyarakat akan pentingnya peran serta dalam pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan pembangunan perlu ditegaskan sebagai upaya yang paling efektif dalam konteks penciptaan *good governance* (Yasir Armen dan Ridlwan Zulkarnain, 2012).

## **D. 2 Partisipasi Bottom Up**

Dalam mencapai *good governance* dalam upaya pembangunan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah akan tetapi perlu adanya pelibatan berbagai *stake*

*holders* seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Agar tercapainya keberhasilan pembangunan maka proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya permasalahan dalam proses pembuatan kebijakan karena merekalah yang mengetahui permasalahan yang terjadi dan mereka pula yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka (Warjio, 2014).

Kebijakan otonomi daerah dengan konsep sistem pemerintahan desentralisasi melibatkan ruang kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mengambil peran yang lebih besar dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan daerah hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berperan dalam merumuskan berbagai pembuatan kebijakan. Dengan demikian proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat telah memiliki salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik.

Adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan daerah merupakan salah satu faktor dari keberhasilan otonomi daerah. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan (Aryati, 2013).

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan. Proses kebijakan pembangunan yang dilakukan secara *top-down*, penentuan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat yang berwenang)

tanpa mengikut sertakan masyarakat dan *stakeholder* lainnya, maaka akibatnya akan banya ditemukan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah diterapkan (Imtihan, 2017).

### **D. 3 Konsep Permusyawaratan**

Karakteristik pemerintah demokratis adalah terdapatnya badan permusyawaratan desa. Yang dimaksud dengan badan permusyawaratan desa dalam UU no 32 tahun 2004 adalah sebutan nama badan perwakilan desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pembentukan yang berfungsi: pertama mengayomi adat istiadat desa; kedua, bersama dengan hukum TUA menetapkan peraturan desa; ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; melakukan pengawasan dari Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa; anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Hukum Tua (Mawara,

Untuk melibatkan masyarakat desa dalam kehidupan politik atau dengan kata lain berpartisipasi dalam ppolitik bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat, akan tetapi membutuhkan proses dengan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup besar. Adanya pemikiran masyarakat jika politik hanya untuk orang-orang yang berkedudukan tinggi dan rakyat hanya dijadikan korban yang tidak tahu apa-apa. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat desa yang lebih baik walaupun masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam politik (Kusmanto, 2013).

Karakteristik mendasar dari demokrasi permusyawaratan yang diungkapkan oleh (Arif, 2016).

1. Demokrasi permusyawaratan merupakan model demokrasi konsensus yang ditawarkan sebagai alternatif penyempurnaan bagi demokrasi majoritarian yang mengedepankan ruang parlemen. Oleh karena itu legitimasi dalam demokrasi permusyawaratan bukanlah prinsip mayoritas melainkan konsensus sebagai hasil dari musyawarah rasional.
2. Adanya perluasan permusyawaratan. Artinya, jika mendasarkan permusyawaratan hanya dalam internal parlemen dengan peserta anggota legislatif yang mewakili partai, mufakat rasional akan sulit tercapai. Akan tetapi logika majoritarian lebih menggunakan mekanisme voting dalam setiap pengambilan keputusan dari pada musyawarah. Oleh sebab itu, ruang permusyawaratan dalam demokrasi permusyawaratan tidak hanya parlemen tetapi juga masyarakat.
3. Demokrasi permusyawaratan adalah model demokrasi konsensus dalam perluasan permusyawaratan antara negara dan masyarakat yang mengarah pada perwujudan keadilan sosial. Oleh sebab itu dalam permusyawaratan keadilan sosial harus menjadi ukuran utama penentu keabsahan kebijakan.

Berdasarkan ketiga karakteristik dari demokrasi permusyawaratan di atas, maka dapat diketahui bahwa legitimasi suatu kebijakan adalah persetujuan dari masyarakat sebagai hasil mufakat dari musyawarah.

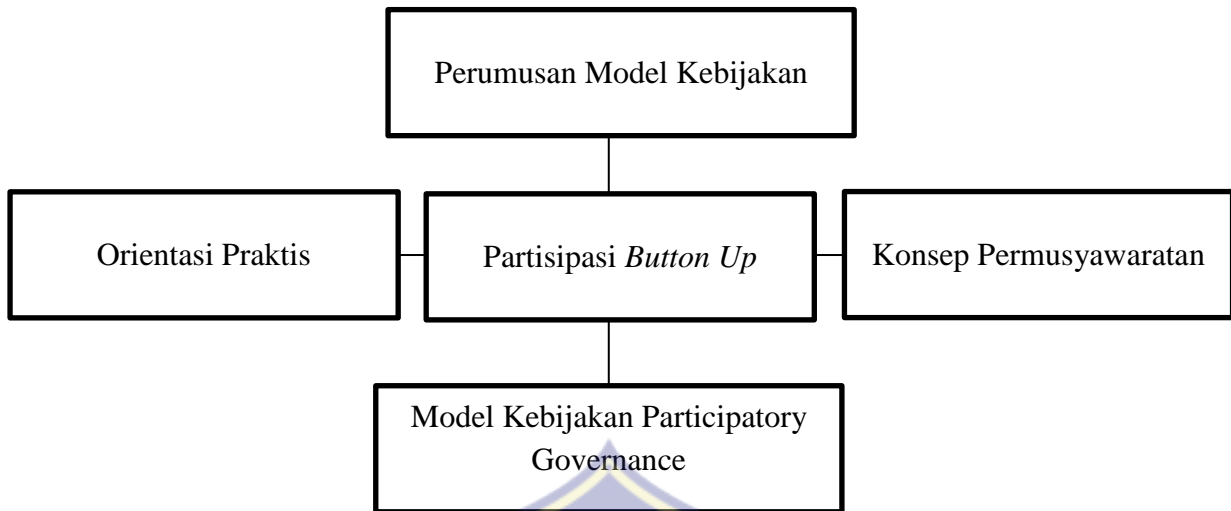
Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dilakukan melalui penyambungan kembali keterpisahan antara negara dengan masyarakat melalui adanya ruang partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penikmat kebijakan-kebijakan pemerintah akan tetapi mulai bergeser menjadi pelaku/subjek

lahirnya kebijakan. Baik demokrasi permusawaratan maupun demokrasi deliberatif, menekankan peran partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. hal ini dilatar belakangi oleh kemunculan gagasan demokrasi dan *good governance* yang memberikan ruang yang sangat besar terhadap partisipasi masyarakat. (Aditya, Al-fatih 2016).

#### **E. Kerangka Pikir**

Pada dasarnya berbagai keputusan mengenai tata kehidupan masyarakat yang diinginkan untuk melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam urusan publik melalui forum-forum terbuka seperti, media massa, *public hearing*, forum warga, dan forum masyarakat luas dilaksanakan melalui proses bersama dengan berbagai *stakeholders* yang terkait dengan kebijakan tersebut khususnya masyarakat marjinal yang akan memberikan informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan public. Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan kondisi setiap daerah masih banyak penyelenggara dan pelaksana unit kegiatan publik tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan publik.

Dalam penelitian perumusan kebijakan yang berjuful Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep), Orientasi Praktis, Partisipasi Button Up, Konsep Permusyawaratan, dengan menggunakan indikator tersebut kemudian dijadikan acuan peneliti mengenai Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

#### F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat berdasarkan latar belakang yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, maka fokus penelitian mengenai Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep). Yakni, sebagai berikut:

1. Orientasi praktis
2. Partisipasi botton up
3. Konsep permusyawaratan

#### G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir tersebut sehingga dapat dikemukakan deskripsi fokus dalam penelitian yaitu:

- a. Orientasi praktis adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem yang baru untuk memudahkan masyarakat dalam penerimaan pelayan yang lebih baik. Sistem pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bukan hanya sekedar pelayanan di instatnsi

pemerintahan akan tetapi bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin.

- b. Partisipasi *Button Up* adalah Perencanaan dengan model ini harus dilakukan secara kolektif, dan melibatkan berbagai unsur-unsur *governance*. Partisipasi adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan yang disusun sampai dengan proses pengimplementasian dengan keterlibatan masyarakat dalam upata pembangunan lingkungan, kehidupan dan untuk diri mereka sendiri dan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator. Hal ini dimaknai sebagai sebuah proses yang memampukan masyarakat lokal untuk mampu melakukan analisis masala, memberikan solusi cara mengatasi permasalahan tersebut, dan mengatasi permasalahan tersebut, dan mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan masalah yang dilakukan dengan pelibatan para bisnu, masyarakat dan pemerintah.
- c. Konsep Permusyawaratan merupakan tata cara yang untuk memudahkan dan juga merumuskan suatu hal atas kehendak dari rakyatnya sehingga mencapai keputusan berdasarkan kebalutan pendapat atau mufakat. Musyawarah adalah jalan terbaik dari pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Dalam proses permusyawaratan hal yang diutamakan adalah kepentingan bersama yang dijadikan prioritas utama adalah “kualitas”, yaitu dari segi isi usulan yang diajukan. Proses musyawarah tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan akan tetapi bagaimana masyarakat ikut serta dalam proses musyawarah memberikan masukan mengenai permasalahan yang mereka alami yang dilakukan dengan pelibatan para bisnu, masyarakat dan pemerintah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan objek penelitian dilaksanakan di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Adapun alasan memilih objek tersebut karena Kabupaten ini menjadi wilayah yang dihuni oleh bisnu, serta untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah daerah melakukan strategi pengembangan pelestarian kebudayaan bisnu di Kabupaten Pangkep.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat bisnu di Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek fenomena, atau setting sosial terjawab dalam suatu tulisan yang berbentuk narasi. Artinya, data, fakta, yang dipadukan dalam bentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan suatu kejadian terjadi (Satori dan Komariah 2009: 28), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang strategi pengembangan pelestarian kebudayaan bisnu di Kabupaten Pangkep.
2. Tipe Penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai Orientasi praktis, partisipasi Button Up dan Konsep Permusyawaratan masyarakat bisnu di Sigeri Kabupaten Pangkep.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai model partisipatori governance (perumusan kebijakan masyarakat adat bissu sigeri kabupaten pangkep), serta data atau informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data mengenai para bissu Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang berada pada lingkungan penelitian, artinya mereka yang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Informan dalam penelitian ini: Bissu sebanyak 3 (tiga) orang, Masyarakat setempat sebanyak 3 (tiga) orang dan pihak pemerintah sebanyak 1 (satu) orang.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang paling strategis dalam suatu proses penelitian, untuk memperoleh data atau informasi

yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015: 137) sebagai berikut:

1. Teknik Observasi; Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis yang dilakukan dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik, yang merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan suatu fakta yang terjadi di lapangan
2. *Interview* (wawancara); Teknik wawancara atau yang sering disebut dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil antara lain, para bisnis, pemerintahan setempat dan masyarakat setempat
3. Dokumentasi; Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel, maupun data yang tersimpan dalam *website*.

#### **F. Teknik Analisis Data**

(Sugiono, 2015: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam proses analisis data kualitatif yang dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*); Reduksi data secara mandiri dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat menjawab pertanyaan dari penelitian, bagi peneliti pemula proses dari reduksi data dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan kepada orang lain yang dianggap ahli dalam bidang yang terkait. Melalui proses diskusi tersebut maka diharapkan

pengetahuan atau wawasan dari seorang peneliti akan berkembang, dan data dari reduksi lebih baik dalam menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data display*); Penyajian atau penampilan (*display*) data, dari proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih banyak proses penyusunan teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada para pembaca. (Sugiyono, 2015: 244) memperkenalkan dua macam format, yaitu: diagram konteks (*context chard*) dan maatriks.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*); Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut pendapat Miles dan huberman adalah proses penarikan kesimpulan hingga verivikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh dikatakan masih bersifat sementara, dan hasil akhir dapat berubah kapan saja bila ditemukan atau tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

#### **G. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benaar merupakan variabel yang ingin diukur. Pengabsahan ini juga dapat diperoleh dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dapat dimakani sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/ teknik penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data ini adalah 2 teknik triangulasi: triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber; Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh dengan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dari hasil wawancara, dengan membandingkan pandangan umum yang diperoleh di lapangan dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik; Triangulasi teknik dilakukan dengan tujuan untuk menguji kredibilitas dari suatu data yang dilakukan dengan cara pengecekan data dengan sumber yang sama dan dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya ketika data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek dengan proses dokumentasi, kuesioner maupun observasi.
3. Triangulasi waktu; Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi, maka proses pengamatan penelitian dilakukan lebih dari satu kali proses pengamatan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Pangkajene. Berdasarkan letak astronomi, kabupaten pangkajene dan kepulauan berada pada 11.00' Bujur Timur dan 040.40' – 080.00' Lintang Selatan. Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Maros
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 12.362,73 Km<sup>2</sup> dengan lautan memiliki luas 11.464,44 Km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah daratan seluas 898,29 Km<sup>2</sup>, dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, 9 kecamatan berada pada daratan dan 4 kecamatan lainnya terletak di wilayah kepulauan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun

perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

## 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan salah satu kota yang dikenal dengan ciri khas yang hanya dikenal dengan hasil perkebunan dan budidaya perikanan nya akan tetapi adat istiadat yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep yang belum diketahui oleh banyak orang terletak pada kordinat antara 1100 sampai 113” Lintang Selatan dan 40 40’ sampai 8.00” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Segeri yang memiliki memiliki luas secara keseluruhan 78,28 km<sup>2</sup>.

Saat ini Segeri telah melakukan berbagai percepatannya khususnya dalam pengembangan khususnya dalam proses perumusan kebijakan, usaha yang telah dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal utama yang harus dilakukan dalam preses pembuatan kebijakan adalah dengan mengikut sertakan masyarakat marginal dalam proses pembuatan kebijakan menjadi hal yang sangat penting sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang mereka butuhkan.

## 3. Gambaran Umum Pemerintahan Segeri Kabupaten Pangkep

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Berdasarkan penjelasan KepMendagri No. 158 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki pedoman organisasi yaitu, camat berkedudukan sebagai koordinator dari penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah dan ber-tanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota.

a. Visi dan Misi

1. Visi

Kabupaten Pangkep mewujudkan desa moderen yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri

2. Misi

Rumusan misi lebih berfokuskan pada, yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang tercermin dalam visi.

b. Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nommor 41 tahun 2007, Bagian Ketujun Kecamatan Pasal 17 ayat 2 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangkep mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

*“Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”*



c. Fungsi

Proses terlaksananya tugas sebagaimana yang disebutkan diatas, Kecamatan Kabupaten Pangkep mempunyai fungsi sebagai berikut:

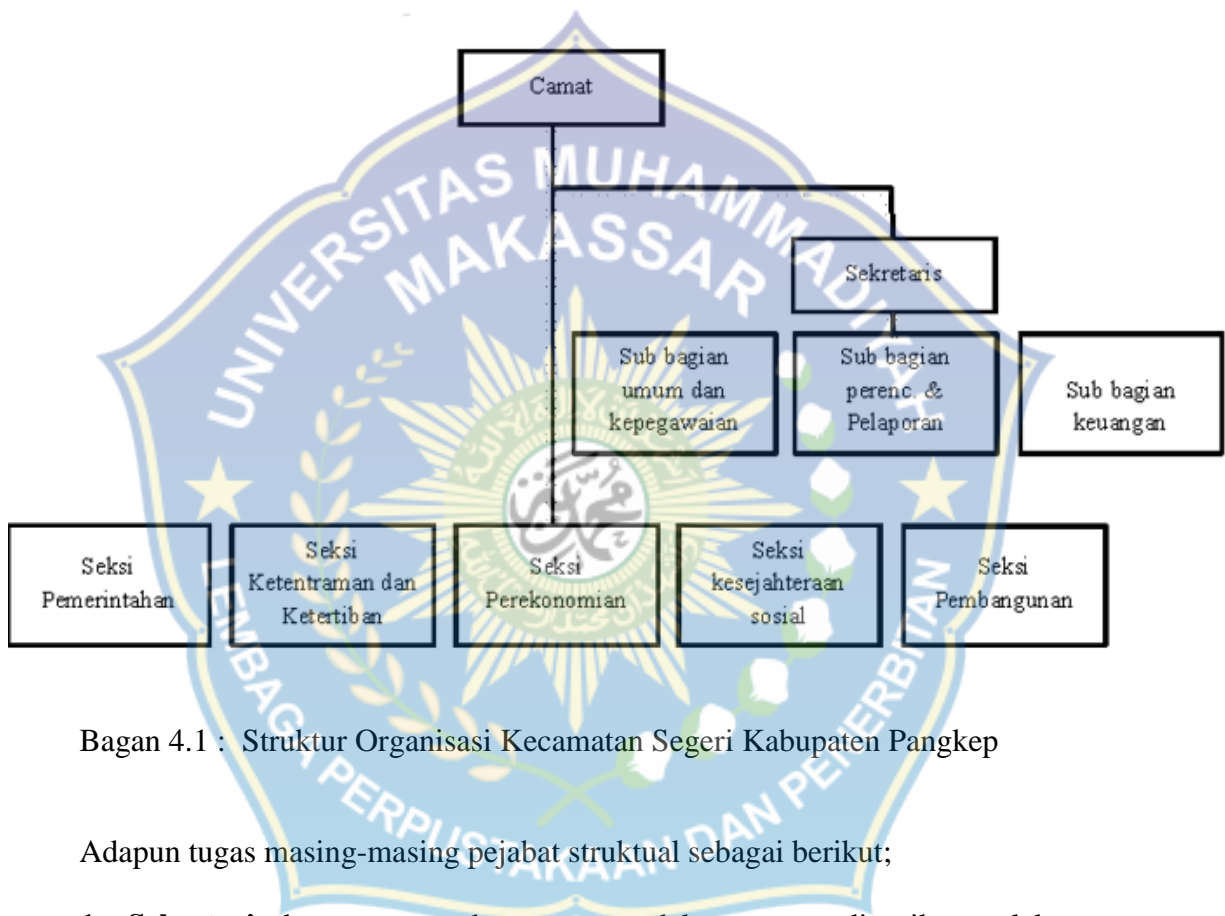
1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep terdiri dari

1. Camat
2. Sekretaris
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian perencanaan & Pelaporan
  - c. Sub bagian keuangan
3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Perekonomian
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pembangunan



Bagan 4.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep

Adapun tugas masing-masing pejabat struktural sebagai berikut;

1. **Sekretaris** bertugas membantu camat dalam mengordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data dll.
  - a. **Sub bagian umum dan kepegawaian** bertugas mengurus persuratan dan kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan

dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan juga bantuan administrasi pemerintahan;

**b. Sub bagian perencanaan & Pelaporan** bertugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan,

**c. Sub bagian keuangan** bertugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan dan menyiapkan bahan persiapan program kecamatan;

2. **Seksi Pemerintahan** bertugas untuk membantu camat dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan;
3. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** bertugas melaksanakan dan membina ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
4. **Seksi Perekonomian** bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perdagangan, perindustrian, perkoprasian, kepariwisataan, dan golongan ekonomi lemah, usaha kecil menengah (UKM) pertanian, perkebunan dan perikanan peternakan,;
5. **Seksi Kesejahteraan Sosial** bertugas membantu camat dalam proses pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
6. **Seksi Pembangunan** bertugas Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.

## **B. Model Participatory Governance (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)**

Teori Participatory Governance digunakan dalam tingkatan aktivitas seperti formulasi kebijakan. Model jaringan kebijakn pada penelitian ini adalah model jaringan yang dikembangkan oleh Govanta J 2001 yaitu perumusan model kebijakan. *Participatory Governance* diidentifikasi sebagai sebuah praktek kehidupan demokrasi moderen yang diselenggarakan secara profesional dan fokus kepada proses perumusan kebijakan yang dilakukan secara kolektif.

Proses perumusan kebijakan yang dilihat secara makro yaitu dengan kerangka teori yang dipergunakan adalah teori pembangunan yang partisipatif sebagai paradigma dasar dalam memberikan alasan bagi pentingnya perumusan kebijakan partisipatif. Model yang digunakan mengacu pada *participatory*, yang merupakan keseluruhan aktor yang terlibat dalam kebijakan publik dikaji secara keseluruhan, tidak hanya pemerintah sebagai salah satu aktor yang memiliki orientasi dalam interaksi tersebut akan tetapi melibatkan *stake holders* yang lain seperti swasta dan masyarakat marjinal. Dalam proses ini orientas dari masing-masing aktor menajdi kunci utama yang mewarnai bentuk dan arahan kebijakan yang dihasilkan.

Hal ini searah dengan pendapat Govanta J 2001 mengenai Model Participatory Governance yang merupakan suatu cara atau landasan dalam mengukur suatu keberhasilan sebuah inovasi yaitu *Orientasi Praktis*; adalah peninjauan untuk menentukan suatu kebijakan yang lebih tepat dan benar, *Partisipasi Button Up*; adalah dalam proses perumusan kebijakn bukan hanya pemerintah yang memili peran penting dalam penting akan tetapi dilakukan oleh

aktor yang bersifat flural atau terdiri dari berbagai *stake holders* lain seperti, swasta dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. *Konsep Permasyarakatan*; Keterlibatan masyarakat berbagai *stake holders* dalam proses perumusan kebijakan menjadi salah satu jargon yang telah mengemuka saat ini untuk mendapatkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kaitannya dengan perbaikan pelayanan publik pusat perhatian ditujukan kepada inovasi yang dilakukan oleh para pelayan publik dengan menggunakan ke tiga indikator tersebut, dan hal ini yang akan menjadi tolak ukur yang digunakan apakah inovasi dalam perbaikan pelayanan publik sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki, sehingga penulis berfokus pada Model Participatory Governance (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) dengan menggunakan teori Govanta J mengenai Model Participatory. Berikut mengenai hasil kajian mengenai Model Participatory Governance (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) dengan menggunakan teori Govanta J.

### **1. Orientasi Praktis**

Orientasi Praktis yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dalam pelayanan publik, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau masih perlu untuk dikembangkan dalam penerapannya bahkan hanya dapat menambah kesusahan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat. Untuk melihat Orientasi Praktis ada beberapa fokus kajian untuk melihat lebih dalam yaitu Kebijakan, Pelibatan Bissu, Pemberdayaan budaya bissu, Kolaborasi:

**Tabel 4.1 Orientasi Praktis Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri kabupaten Pangkep**

<b>Informan</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Pelibatan Bissu Dalam Kegiatan Pemerintah</b>	<b>Pemberdayaan Budaya Bissu</b>	<b>Kolaborasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Ketua adat bissu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada bantuan cuma janji untuk dapat bantuan</li> </ul>	kegiatan pemerintah	kalau ada keperluannya	Kerjasama bagus
(Perangkat Bissu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi rumah dan pencahayaan</li> <li>• Menghadirkan</li> </ul>	kegiatan pemerintah	peranan dalam pemerintah sebagai tokoh yang dituakan	komunikasi alat pertanian
(Perangkat Bissu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dalam acara-acara</li> </ul>	Mengundang para bissu untuk beratraksi atau hanya sekedar memperkenalkan kebudayaan bissu	Jika ada yang mengundang mereka akan menghadiri untuk magiri	Pemerintah datang mengundang
Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kepedulian</li> <li>• Dianggap pemborosan</li> </ul>	Adanya penjualan adat yang dilakukan	Tidak ada pemberdayaan sampai sekarang	Pemerintah akan datang saat membutuhkan bissu
Mantan Anggota DPR (Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi rumah</li> <li>• Bantuan dana</li> </ul>	Misalnya kedatangan buati dll	Hanya jika ada kaitanya dengan kebudayaan	tidak ada sinergitas dari pemerintah
Mantan Pengurus Arajang (Masyarakat)	Tidak ada perhatian	pelibatan bissu kegiatan pemerintah	pemberdayaannya bissu itu tidak ada campur tangan pemerintah	Hanya diberikan izin
Camat Segeri	Memfasilitasi tempat tinggal	kalau ada acara kegiatan di kabupaten itu ditingkat-tingkat provinsi atau tingkat nasional	yang terlibat dengan pemerintahan dengan masyarakat	pemerintah tetap memperhatikan

Sumber : Hasil Reduksi Data 2019

- a. Pada tabel 1 bagian pertama merujuk pada Orientasi Praktis yang berfokus pada kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan atau tidak terhadap Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep yang dilakukan oleh

pemerintahan Segeri. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial BN (Ketua Adat Bissu Segeri) yang mengatakan bahwa :

*“...ede’ni gaga, denagaga baantuang puraka dilantik engkana dua taung depa gaga bantuanna tumai eee tebbere, teegabah teng iyaro galungge, tedoi de’ gaga balanca na arekka eso-eso iyaro wettunna te mallanti ana’ de’ dipasitinajai fenno yaeddi lapangange diolo engka manenni pak bupati, dpr, cama’ engka manenni kedda wa’ nani jaddi pammatoa dibacani yasingge difasumpana pak cama te sumpai selain ro ana’ batena maccarita de’ dipasitinajai pammarenta engka manenggi saksikanngga na de’gaga bantuang na rengga makkedai ro waktukku dilantaik pa engka manegi bupati aga metteki aro denre bissue seddi makedda sedi juta kasi arengi si huleng tappa mette aro pak cama kedda seddina juta si tengga madaena ku si huleng de’wita gaga na’ dua taunna fura dilantik”* “...tidak ada lagi bantuan, setelah dilantik sudah ada dua tahun belum ada bantuan tanpa beras, tanpa padi, tanpa sawah itu, tanpa uang tidak ada uang belanja setiap hari yang saya dapat. Waktu saya pelantikan nak tidak sebanding lapangan depan penuh semua pak bupati, DPR, camaat, semu datang menyaksikan pelantikan wa’ Nani menjadi pammatoa dan yasin pun dikomandangkan dan disumpahkan oleh pak camat selain itu nak cara pemerintah bercerita tidak sesuai semua datang menyaksikan tapi tidak ada bantuan sedikit pun yang mereka berikan mereka pu berkata waktu saya dilaantik karena semua bupati apaa semua datang dan salah satu bissu pun berkata cukuplah satu juta perbulan dan pak samat pun langsung berkata satu juta stengah dalam satu bulan cukuplah itu, tidak ada saya liat nak saya sudah dilantik selama dua tahun” (Hasil wawancara, 18 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan BN dapat disimpulkan bahwa Setelah dua tahun diadakannya pelantikan ketua arajang segeri selama itu pula tidak ada bantuan perekonomian yang diberikan untuk para bissu dari pemerintah. Proses pelantikan yang dihadiri oleh Bupati, DPR, Camat dll dengan hasil musyawarah bahwa bantuan yang akan diberikan kepada para bissu yang ditawarkan oleh salah satu bissu minimal satu juta rupiah setiap bulan yang mereka dapatkan dan camat pun menambahkan menjadi satu juta lima ratus tiap bulan akan tetapi hal itu tidak terealisasi sesuai dengan hasil musyawarah dengan paara pemerintah dan para bissu selama dua tahun ber turut-turut.

Selanjutnya pernyataan BN senada dengan pendapat informan yang berinisial BN (Perangkat Bissu) yang mengatakan bahwa :

*“Degaga na’ de’ denagaga bantuan na rekki ya ku engka bantuan degaga lettu na’ yabahang ro jasa bissuku fole d haling, ee iyaro dari bissuemakuae engka gajinna engka anunna huleng puleng na de’gaga ku tania idi nruntu berre pammarenta de’gaga engka gah kero na fau ku engka bantuang na renggi taue de’gaga denapa gaga lettu selong maneka kasi ro lao juppandang biasa ro na kan na pau bawang mi, dena gaga kebijakan atau bantuan aga tumai iyaro na cauki...”* “Tidak ada nak tidak ada bantuan yang diberikan kalau pun ada bantuan tidak ada yang sampai nak yang ada cuman jasa bissu dari halim, ee bissu itu punya gaji yang mereka dapat setiap bulan tapi tidak aada kalau kita tidak dapat beras dari pemerintah tidak ada ada adakah yang mereka katakan kalau ada bantuan yang diberikan kepada kami belum ada yang sampai saya sama dengan mereka ke Makassar mereka menjanjikan, tidak ada kebijkaan atau bantuan apakah yang mereka berikan kepada kami itulah yang membuat kami capek...” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan BN dapat dianalisis bahwa tidak ada perhatian pemerintah kepada para bissu, yang mereka dapatkan hanya berupa penghargaan dari hasil pementasan bissu di beberapa daerah yang seharusnya mendapat pemasukan setiap bulan dari pemerintah seperti yang telah mereka janjikan akan tetapi hal itu tak kunjung sampai hal itulah yang menyebabkan kurangnya minat para bissu untuk melakukan berbagai atraksi atau pentas dalam upaya pertahanan budaya bissu ini.

Dari hasil wawancara dengan informan BN dan BN menunjukkan bahwa dalam pembuatan kebijakan itu harus benar-benar dapat memberikan manfaat yang tepat kepada masyarakat yang dituju karena dengan adanya kebijakan memudahkan dan sangat berdampak pada perbaikan pelayanan publik yang lebih baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh pendapat informan yang berinisial AB yang mengatakan:



“Begitulah kayaknya ini pemerintah kayaknyaa tidak terlalu anu tidak terlalu peduli ...” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ab bahwasanya Tidak ada perhatian pemerintah kepada para bissu. Selanjutnya pernyataan AB senada dengan pendapat inforan yang berinisia M (Mantan Pengurus Arajang) yang mengatakan bahwa :

“tidak ada dari dulu sampai sekarang tidak diperhatikan sampai sekarang” (Hasil wawancara, 30 Mei 2019).

Hasil wawancara dari informan M pun berpendapat serupa dengan informan AB yang mengaatakan bahwa Dari zaman dulu sampai sekarang pemerintah tidak pernah memperhatikan bissu.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa perumusan kebijakan adat bissu Segeri Kabupaten Pangkep belum maksimal. Hal ini dikaerankan tidak adanya kebijakan yang berkaitan dengan bissu karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap bissu dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya hanya sekedar wacana tanpa implementasi.

- b. Tabel 1 bagian kedua merujuk merujuk pada Orientasi Praktis yang berfokus pada pelibatan Bissu dalam kegiatan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan para Bissu dalam setiap agenda yang dilakukan oleh pemerintah terhadap. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial BN (Ketua adat bissu) yang mengatakan bahwa:

*“biasana yakoo atau engka gubernur romai fole jakarta dijempuki atau elomi mappabotting aga”* “...biasanya kalau ada kegiatan pemerintah seperti kedatangan gubernur dari jakarta dijemput atau hanya dengan acara pernikahan atau apa” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan informan BN mengatakan bahwa Kegiatan bissu biasanya dilakukan pementasan paada waktu-waktu tertentu seperti dala

kegiatan pemerintahan penyambutan gubernur atau pejabat-pejabat lainnya yang memerlukan pementasan tarian magiri yang dilakukan oleh para bissu ataupun dalam acara pernikahan dan beberapa acara lainnya.

Pernyataan BN senada dengan pendapat informan yang berinisial BE (perangkat Bissu) yang mengatakan bahwa:

“Kemarin kegiatan pemerintah yang melibatkan bissu itu hari jadi pangkep terus ada pencongklingan bissu juga terlibat pesta panen tingkat kabupaten pameran pembangunan” (Hasil Wawancara, 30 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas dengan informan yang berinisial BE menyatakan bahwa adanya pelibatan bissu dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Peringatan hari jadi Pangkep dan pencongklingan atau pesta panen dan pameran pembangunan adalah salah satu kegiatan yang didalamnya melibatkan bissu entahkah sebagai peserta atau untuk melakukan beberapa atraksi/ pementasan kebudayaan.

Pernyataan informan BE diperkuat dengan pernyataan informan HA yang mengatakan bahwa:

“seperti ada gubernur, kepala daerah yahh baru digerakkan kalau tidak yah tidur saja di seblah hahaha” (Wawancara, 20 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan H A mengatakan bahwa Bissu hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu misalnya dalam pemerintahan bissu digunakan dalam rangka penyambutan gubernur, kepala daerah.

Argumen ini diperkuat dengan argumen informan dengan inisial S (Camat Segeri Pangkep) yang mengatakan bahwa:

“kadang, kalau adaaa acara kegiatan di kabupaten itu ditingkat-tingkat provinsi atau tingkat nasional itu biasa ditampilkan eee bissunya supaya dari kabupaten-kabupaten lain bisa lebih mengenal lagi bahwa bissu itu begini ada di Pangkep ini tari-tariannya yang ada di Pangkep” (Hasil wawancara, 19 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan informan S mengatakan bahwa Bissu biasanya hanya digunakan pemerintah dalam kegiatan acara di kabupaten tingkat provinsi atau tingkat nasional hal ini untuk memperkenalkan bissu di berbagai daerah atau kabupaten lain dengan keberadaan tari-tarian para bissu Segeri Pangkep

Akan tetapi hal ini dibantah oleh informan berinisial A B selalu (Pemangku adat Segeri) yang mengatakan bahwa:

“kalau sebenarnya menurut struktur kerajaan itu tidak boleh sembarangan itu tapi zaman sekarang ini kayaknya dijual adat inilah yang susah, apa sebabnya begitu karena ini bissu-bissu ini tidak punya penghasilan jadi bagaimana cara untuk bisa pigi artinya ditempat ramai atau apa maggiri mendapatkan uang sebenarnya tidak boleh begitu tidak boleh sama sekali dijual itu adat, dijual namanya itu sekarang ini yah seperti yang saya bilang tadi bagaimana perhatian pemerintah yang seharusnya begitu bagaimana caranya untuk hidup jadi ini kepala bissunya yang bernama nani pammatoa yang tinggal disini dia tidak punya penghasilan hanya misalnya kalau ada orang yang pigi bawakan pisang uang dua puluh ribu apakah itu cukup yah memang sebenarnya tujuannya seperti itu seperti zaman kerajaan seperti zaman dulu zaman kerajaan seperti setiap ada tamu atau raja ada pesta seperti sekarang ini kalau misalnya ini ada calon bupati atau calon gubernur itu bisa diundang itu bissu tapi kalau untuk pengantin-pengantin itu dijual itu bissu tapi kita mau tekan bagaimana caranya kita pun tidak bisa kasi makanan itu bissu rata-rata banyak kepandaiannya utamanya pandai makindo botting pandai mabeppa” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan S yang menyatakan bahwa: Dalam struktur kerajaan sebenarnya tidak membolehkan bissu dalam melakukan berbagai pementasan di beberapa daerah akan tetapi hal yang terjadi sekarang seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwa terjadinya penjualan kebudayaan yang dilakukan hal ini dikarenakan tidak adanya penghasilan para bissu untuk keberlangsungan hidup mereka, itu sama halnya dengan melakukan penjualan kebudayaan. Inilah seharusnya peran

pemerintah untuk menghidupkankembali kebudayaan bissu ini, seperti yang dilakukano oleh ketua bissu yang bernama wa Nani yang menempati arajang yang tidak mempunyai penghasilan hanya misalnya mendapat penghasilan jika mendapat panggilan untuk melakukan pementasan dengan memberikan uang sebesar dua puluh ribu rupiah atau pisang yang diannngap belum mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bissu sebenarnya pada zaman dulu bertugas dalam acara raja hal ini pun setara dengan penyambutan calon bupati atau calon Gubernur saat itulah bissu diundang akan tetapi jika dalam agenda selain dalam pemerintahan seperti dalam acara pernikahan hal ituah yang dilakukan untuk melaakukaan penjualan kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pelibatan bissu dalam pemerintahan perlu adanya suatu inovasi perbaikan dalam kebijakan publik yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya bagi pemerintah karena dengan adanya kebijakan ini yang mellibatkan bissu dalam beberapa kegiatan yang disusun oleh pemerintah dapat memberikan penghasilan kepada para bissu dan tidak perlu melakukan penjualan kebudayaan.

- c. Tabel 1 bagian ke tiga merujuk pada orientasi praktis yang berfokus pada pemberdayaan budaya bissu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tujuan pemberdayaan bissu yang harus dicapai ketika membuat sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Segeri. Pernyataan informan BE diperkuat oleh pernyataan informan S yang mengatakan bahwa:

“Jadi kegiatannya yang terlibat dengan pemerintahan dengan masyarakat jadi kegiatan nya itu rutin setiap tahun dilaksanakan kalau mau turun sawah, itu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, kegiatan pemerintahan atau kegiatan kemasyarakatan kadang setiap

setiap tahun dilaksanakan itu wajib, jadi mereka laksanakan itu ritual pada tahapan-tahapan setiap lima hari sebelum turun sawah itu dilaksanakan sampai satu minggu ah itu partisipasi masyarakat pemerintah untuk memberikan biaya pelaksanaan kegiatan” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan informan S yang mengatakan bahwa: kegiatan rutin yang terlibat dengan pemerintah dilakukan oleh para bissu setiap tahunnya dilakukan jika akan turun sawah atau biasa disebut dengan magiri atraksi kebudayaan yang dilakukan dengan tarian tradisional dan melakukan berbagai atraksi dengan benda tajam pada diri mereka untuk menarik wisatawan datang yang dilakukan lima hari sebelum turunnya ke sawah dan itulah partisipasi pemerintah untuk memberikan biaya dalam kegiatan tersebut

Lain halnya dengan pernyataan dari informan BE (Perangkat Bissu) yang mengatakan bahwa:

“Bissu mempunyai peranan dalam pemerintah sebagai tokoh yang dituakan” (Hasil Wawancara, 30 Mei 2019).

Hasil wawancara dengan informan BE yang mengatakan bahwa Bissu adalah tokoh kebudayaan yang memiliki peran dalam daerah Segeri yang sebagai tokoh yang dituakan dalam pemerintahan.

Pernyataan informan BE didukung dengan pendapat informan yang berinisial BN (Perangkat Bissu) yang mengatakan bahwa:

*“iyaro diolo bissupa pakedoi ku engka gauna kutania bissu dena naelo, iya idi bissue ku engkasi romai tau marola laosi ma bissu marola asenna difigaurang anunna nappa diareng doi”*...“pada zaman dulu semua kegiatan menggunakan bissu dalam berbagai kegiatan beratraksi mereka tidak mau kalau tanpa bissu, mereka para bissu ketika ada yang mengundang mereka akan menghadiri untuk magiri kita datang pentas memenuhi permintaan mereka dan memberikan kami uang” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan BN dapat disimpulkan bahwa Pada zaman dulu setiap kegiatan harus menggunakan jasa para bissu dalam melakukan berbagai atraksi kebudayaan yang dilakukan dan setelah melakukannya mereka akan mendapat bayaran dari hasil kerjanya. Bissu pada zaman dulu berbeda dengan bissu zaman sekarang yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya minat para bissu untuk tetap beratraksi dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Hal ini lagi-lagi diperkuat oleh pernyataan informan yang berinisial BN (Ketua adat bissu) yang mengatakan bahwa:

*“Naolli, ku engka addena na’ elo na pogau nappa mattariolo na bissupa na rekeng elo laksanakan ma bissu pa tauwe na siaga elo mu arekka ana’ pa ku padang metoi haa ana’ kude mu rekka kasi pabarekke sumange dena tu kasi gaga na wedding dipake paa iyaro pakokoe bissue umpamana pa kuni dialeta maccarita yaku degaga doi de’ diullei massu paa eloki melli bensing apalagi ku koeki d bolae ana’ eloki melli golla, eloki melli kofi, eloki melli teng, elonni melli pejje eloni melli pissing, iyaro jadi ku degaga na’ lebbiki ku monroka di bolae tudang umpamana jadi ku engka tumai anunna pamarenta ke adampengannga na’ pakogi tumai apa iya ro pa iyaro wita bissu-bissue ana’ dena wita gaga elo loka maccule bawang padatoni pa rabanae, pa genrang-genrangge, pammecae pakuttoni ro kapang bissue yaku dioliki na ddegege doinaa ne to naelo, de naelo makkedai aga uala lao na engka aga-gakku ku parakai dimunri lenye amenggi maga ammengi agana ku anre ko lisuka jadi lebbiki menyengge bage duai elona teanna...”*...“dipanggil, kalau ada keperluannya nak yang mau mereka laksanakan tapi bissu yang mereka mau gunakan yahh kita ma bissu berapa yang bisa kamu berikan nak karena saya memang sudah sampaikan nak kalau kau tidak memberikan sedikit tidak ada yang bisa dipake karena bissu umpamanya kalau kita kalau kita tidak punya uang kita tidak bisa keluar karena kita mau membeli bensin apalagi kaalau kita untuk kebutuhan sehari-hari d rumah kita mau membeli gula, membeli kopi, membeli teh, mau belli garam, mau belli micin itulah jadi kalau tidak ada nak mending saya tinggal di rumah duduk santai misalnya jadi kalau ada yang datang kemari misalnya pemerintah saya minta maaf nak bagaimana ini krena ini saya liat para bissu nak’ sudah tidak ada yang mau datang dengan sekedar bermain seperti pemain rebana, pemain gendnag pencak silat begitu pula dnegan para pemain bissu kalau ada panggilan tapi tidak ada dana mereka juga tidak mau, mereka tidak mau mereka merkata apa apa yang saya dapatkan jika saya pergi sedangkan barang-barang saya yang saya

bisa perbaiki dibelakang jangan sampai kemudian saya tinggalkan barang saya hilang apa yang akan saya makan kalau saya balik jadi lebih baik saya tinggal ½ kemaunya dan tidaknya....” (Hasil Wawancara, 18 Juli 2019).

Jika ada yang mau menggunakan jasa para bissu dalam melakukan pementasan hal yang harus mereka lakukan adalah melakukan pembayaran hal itulah yang diungkapkan oleh pammatoa disitulah penghasilan yang didapatkan oleh para bissu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti kata pepatah ada uang ada barang seperti itu pula lah kata bissu jika ada uang yang mereka berikan maka mereka akan datang akan tetapi jika tidak ada uang mereka juga enggan untuk melakukan pementasan hal ini dilakukan oleh pammatoa dikarenakan tidak adanya pemain dari setiap pementasan yang akan ikut dalam berbagai pementasan jika tidak ada bayaran yang mereka terima baik itu para pemain musik ataupun para bissu. Peran bissu dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak serta merta mereka lakukan tanpa ada bayaran yang mereka dapatkan akan tetapi dengan itulah mereka bisa bertahan hidup.

Pernyataan BN diatas didukung dengan pendapat informan yang berinisial HA yang mengatakan bahwa:

“iya kadang seperti kalau lomba desa di Tompo bulu diundang dia untuk anuu ee ditampilkan pakaian adatnya meskipun tidak magiri disana dia cuman ambil apa namanya ee tarian dan manggaru istilahnya mungkin ade-ade tau penyambutan keluarga raja kan sering” (Hasil Wawancara, 20 Juni 2019).

Kehadiran para bissu dalam berbagai kegiatan tidak hanya dilakukan dengan kegiatan magiri akan tetapi kadang kala dilakukan dengan menampilkan pakaian kebudayaan atau pun dengan manggaru adat-adat penyambutan keluarga raja.

Dari hasil wawancara dengan informan BN hal ini diperkuat dengan argumen informan M yang mengatakan bahwa:

“itu pemerintah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bissu dengan arajang hanya petani saja, kalau pemberdayaannya bissu itu tidak na campurki pemerintah kalau mau turun sawa itu ji saja kegiatannya magiri” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M yang mengatakan bahwa: Pemerintah dan bissu tidak memiliki kaitan khusus karena bissu hanya petani biasa, urusan pemberdayaan bissu tidak di hiraukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa peran bissu dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan mengikut sertakan bissu dalam berbagai kegiatan kebudayaan dan penyambutan pemerintahan.

- d. Tabel 1 bagian ke empat merujuk pada orientasi praktis yang berfokus pada kolaborasi. Hal ini menunjukkan orientasi atau kerja sama antara pemerintah dengan bissu yang dilakukan oleh Segeri Pangkep dalam mempertahankan kebudayaan bissu. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial S yang mengatakan bahwa:

“Jadi begitu tadi saya bilang pemerintah tetap memperhatikan eee kepentingan-kepentingan yang akan dilaksanakan bissu memperhatikan fasilitas-fasiliitasnya orang-orang bissu tapi contoh saya bilang pemerintah sudah membangun tempat tinggal atau rumah atau yang dibilang arajang jadii rumah arajang disana itu ditempatnya sudah ada dua, sudah ada dua karena itu yang satu sudah lama jadi pemerintah lagi mebangunkan satu tempat perumahan satu rumah yang ditempati setiapa ada kegiatan-kegiatan di Segeri” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan infroman S mengatakan bahwa: Pemerintah tetap memperhatikan kebedaraan bissu dan kepentingan-kepentingan para bissu dengan cara menyediakan fasilitas rumah atau yang



sering disebut dengan arajang kepada para bissu, yang terdiri dari dua arajang hal ini dilakukan pemerintah karena rumah arajang yang dulunya bangunan posyandu yang dialih fungsikan menjadi arajang dan kondisinya sudah rusak pemerintah pun kembali melakukan pembangunan arajang baru dengan tujuan agar supaya setiap kegiatan-kegiatan kebudayaan di Segeri dapat dilakukan di arajang.

Pernyataan diatas ditambahkan oleh informan dengan inisial BN (Ketua adat bissu) yang mengatakan bahwa:

*“ooh magellomu na’ kerja samana nakero kasi ku fura na fake bissue pada lisu bolana na renni doi. nee iyami ro degaga biaya na fura dibicarakang biasa iya murusukenggi pakkohe engka bituanna doi lessesi lao dialena jadi iyaro umpamana pammarenta de’ nasalah nasaba lima adannu seddi adanna pammarenta jadiki pammarentah mappakero ana’ iyami na salah ku panggurusuna salah iyaro mai na laokku Cuma tambahan mi ku sappa”...“ohh bagus nak kerjasamanya misallnya kalau saya sudah dipake mereka pada kembali ke rumahnya masing-masing dan mereka memberikan uang bayaran nya. Tapi Cuma itu kendalanya tidak ada biaya yang sudah dibicarakan biasanya mereka yang pengurus begini artinya ada uang tapi diambil alih oleh mereka jadi misalnyaa pemerintah tidak salah karena kita punya lima perkataan tapi pemerintah punya satu perkataan perkataan pemerintah yang akan menang begitulah nak biasanya terjadi kesalahakan kalau kalau pengurus nya lah yang salah itulah nak kepergian saya Cuma untuk mencari tambahan saja” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).*

Hasil wawancara deengan informan BN yang mengatakan bahwa Setelah bissu melakukan tugasnya bissu akan mendapat bayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, jika memang pemerintah telah melakukan pengaraan untuk bantuan yang telah dijanjikaan dari pihak penguru lah yang kemudian melakukan kecurangan dengan cara mengambil alih uang tersebut. berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tujuannya lima kata yang diucapkan

masyarakat dan pemerintah mengucapkan satu kata maka pemerintah akan tetap menang.

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan yang berinisial BN (Perangkat Bissu) yang mengatakan bahwa:

*“Lao romai pammarentae molliki mabbisu taauwe lao pangkajenne, jumppandang, lao tega faa iyafa na jaji faa laoi na pitang ku engka mapakero”*...“Pemerintah datang mengundang kami untuk mabbissu ke Pangkajenne, Makassar, atau ke mana karena untuk memperlihatkan kalau ada bissu” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan informan BN mengatakan bahwa: Pemerintah mengundang para bissu dalam melakukan atraksi magiri hal ini bertujuan untuk memperkenalkan bissu diberbagai daerah.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan tersebut berbeda dengan pernyataan informan AB (Pemangku adat Segeri) yang mengatakan bahwa:

“Kalau seperti sekarang ini yang saya liat kalau pemerintah membutuhkan bissu yah baru datang tapi kalau tidak yahh tidak juga karena ini seperti yang saya katakan bahwa dia tidak ada untuk menunjang kehidupannya” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Informan Ab berpendapat bahwa Pemerintah akan melirik bissu jika pemerintah membutuhkan para bissu begitu sebaliknya. Pernyataan dari informan AB diperkuat oleh pernyataan informan HA yang mengatakan bahwa:

“sepertinya tidak adda sinergitas karena itu dia berkomunikasi kalau mau turun sawah setelah itu kalau ada yang mengundang kalau ada keterkaitan dengan kebudayaan dia diundang dia hanya mau mengunggu undangan atukah per orangan ada orang kawinan yang mau menampilkan budayanya disini diundang tersendiri baru dia diundang justru yang memanfaatkan dia banyak-banyak orang dari luar bilang kau dikasi Rp.100.000, Rp.200.000 tidur di hotel melati sudah merasa puas sekaali padahal yang memanggil dia itu jutaan iyaa saya pernah liat di bandara itu pemandu wisata begitu keluar anak-anak yang pakaian baju bodo diusir masuk masuk masuk karena itu orang-orang belanda sudah mau berfoto bersama padahal mereka jual iyaa anak-anak tidak boleh kelura dulu sebelum ada perintah dari anunya ee pemandu wisata itu karena kan pemandu wisata ada nego dulu baru bisa dan promosikan

tahun lalu itu bissu segeri di bandara kalau tahun ini tidak tau masih ada atau enda besar itu anunya kunjungilah Pangkep disana ada ini ada ini paling ditonjilkan itu Bissu segeri karena wisataewan dari luar itu banyak yang tau artinya artis dengan pemain bayaran” (Hasil Wawancara, 20 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan informan HA yang mengatakan bahwa Tidak ada sinergitas antara pemerintah dengan para bissu, keterlibatan para bissu dengan pemerintahan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang berkaitan dengan kebudayaan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan justru yang mengunnakan para bissu adalah mereka dari non pemerintah untuk kepentingan pribadi hal inilah yang membuka peluang untuk terjadinya penjualan kebudayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu.

Hal ini pun diperkuat dengan argumen dari informan yang berinisial M yang mengatakan bahwa:

“disini tidak ituji saja anunya pemerintah disini kalau mau ma ppalili saja dibelikan kesempatan ma palili diberikan saja izin tidak ada begitu saja” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kolaborasi anatara pemerintah dan para bissu yang menyebabkan semakin terkikisnya kebudayaan bissu yang ada di Kabupaten Pangkep. Hal inilah yang meyebabkan mudahnya termanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam melakukan penjualan kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) pada bidang kajian orientasi praktis menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebudayaan bissu hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya bantuan prasarana

yang mereka dapatkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan pelibatan para bisu dalam agenda pemerintahan hanya dilakukan ada waktu-waktu tertentu sehingga hal ini menyebabkan kurangnya persatuan antara pemerintah dan bisu dalam upaya pemberdayaan budaya bisu yang menyebabkan mudahnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memberikan hasil bagi mereka dalam melakukan penjualan kebudayaan.

## 2. Partisipasi *Button Up*

Partisipasi *Button Up* merupakan sebuah struktural yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai stake holder dari yang paling bawah untuk melakukan perumusan kebijakan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target sasaran kebijakan yang diinginkan. Proses perumusan kebijakan melihat bagaimana proses perumusan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada perbaikan pelayanan. Proses yang baik akan sangat mempengaruhi perumusan kebijakan sehingga dalam proses pembuatan diperlukan pelibatan berbagai stake holder dari masyarakat marginal yang akan menerima kebijakan sampai ke pemerintah yang akan menerapkan kebijakan.

**Tabel 2 Partisipasi *Button Up* Perumusan Kebijakan Adat Bisu Segeri Kabupaten Pangkep**

<b>Informan</b>	<b>Partisipasi Bisu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Ketua adat bisu (Perangkat bisu)	Penyambutan camat/gubernur Banyak partisipasinya bisu dalam pemerintahan
(Perangkat bisu) Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	Adanya penjualan kebudayaan Ada kunjungan kepala daerah
Mantan anggota dpr (masyarakat)	Hanya ada kerja sama dengan pemerintah jika mereka diundang

Mantan pengurus arajang (masyarakat)	Kegiatan magiri
Camat segeri	Bissu tidak terlibat kalau orientasi pemerintahan

Sumber : Hasil Reduksi Data 2019

- a. Pada tabel 2 merujuk pada Partisipasi *Button Up* yang berfokus terhadap partisipasi bissu dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan diperlukan tahapan yang harus dilaksanakan untuk membuat sebuah kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat dan membantu dalam perbaikan pelayanan publik. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial BN (Ketua adat bissu) yang mengatakan bahwa:

*“tetapki na’ tetapki maccoe anunna fammarentae biasana yakoo atau engka gubernur romai fole jakarta dijempuki atau elomi mappabotting aga farelui bissu pada diolini bisue...”* “...Tetap nak mereka tetap ikut kegiatan pemerintah biasanya kalau ada biasanya kalau ada kegiatan pemerintah seperti kedatangan gubernur dari jakarta dijemput atau Cuma dengan acara pernikahan atau apa yang mau menggunakan bissu bissu akan diundang...” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).

Dari hasil pernyataan informan BN yang mengatakan bahwa: Agenda pemerintahan yang mengikut sertakan bissu salah satunya adalah penyambutan gubernur dll. Tidak hanya dari pemerintahan akan tetapi beberapa oknum lainnya seperti acara pernikahan atau acara lainnya yang menggunakan bissu. Hal ini diperkuat dengan argumen dari informan inisial BE yang mengatakan bahwa:

“Banyak sekali partisipasinya bissu dalam pemerintahan termasuk penjemputan tamu kayak gubernur, presiden itu bissu terlibat terus ee ma pateddu ripa seperti acara-acara adat pangkep mereka terlibat sebagai pelaku upacara-upacara adat” (Hasil Wawancara, 30 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berinisial BE banyak partisipasi bissu dalam agenda pemerintahan contohnya

penjembutan gubernur sampai presiden atau acara-acara adat yang dilakukan di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berinisial BN dan BE mengatakan bahwa banyak partisipasi para bissu dalam agenda pemerintahan seperti penyambutan para pejabat daerah yang selalu melibatkan para bissu.

Bededa hal nya dengan pernyataan informan diatas yang mengatakan bahwa para bissu akan ikut berpartisipasi jika ada imbalan yang mereka dapatkan dari hasil kerja mereka. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pendapat informan yang berinisial BN (Perangkat Bissu) yang mengataan bahwa:

*“lao mabissu ya ku naollika i nani ma ufe ku engka ta Rp.500.000 na reinngi lao jakarta iahh enjana mobbika denaa ku salaiki bolau iya makedda metokka enjaana mu ollika teana lao dena ku ullei, ya ku enka dalleku ennga meto tu menre dalleku romai, iyaro lao lao jakarta aga tega tumai na balu te roo kebudayaangge na dena to gaga diruntu”*  
“...Kami ma bissu jika ammatoa Nani diundang untung, kalau Rp.500.000 lah kami dapat ke Jakarta misalnya kalau ada yang menundang saya sudah tidak mau pergi meninggalkan rumah saya saya sudah bilang sebelumnya, kalau saya punya rezeki, rezeki itu akan datang ke saya, misalnya ke Jakarta atau ke mana mereka jual kebudayaan dan tidak ada yang kami dapat” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa: para bissu akan melakukan pentas yang sebelumnya mendapat panggilan yang diwakili oleh ketua bissu atau pammatoa dengan mendapat upah minimal lima ratus ribu rupiah per penras yang dilakukan. Akan tetaapi sekarang sudah banyak para bissu yang tidak mau melakukan tradisi mabissu dikarenakan kurangnya biaya yang mereka dapatkan dan dan banyaknya yang melakukan penjualan kebudayaan.

Pendapat BN senada dengan pendapat informan yang berinisial AB (Pemangku adat Segeri Pangkep) yang mengatakan bahwa:

“partisipasinya seperti saya liat kaalau ada anuu seperti ada kunjungan kepala daerah kaalau tidak yah” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan AB mengatakan bahwa: partisipasi para bisu dalam agenda pemerintahan dilakukan pada saat adanya kunjungan kepala daerah dan para bisu bertugas dalam penyambutan pemerintah.

Hasil wawancara dengan informan BN dan AB menunjukkan bahwa Partisipasi bisu dalam agenda atau agenda pemerintahan adalah sesuai dengan kebutuhan kapan mereka akan digunakan. Hal inipun diperkuat dengan hasil wawancara informan yang berinisial HA (masyarakat) yang memiliki pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwa:

“dia hanya da kerja sama dengan pemerintah kalau mereka diundang dia apaa insitental sifalnya yahh kegiatan yang kira-kira kalau dimunculkan dai ada daya tariknya”(Hasil Wawancara, 20 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan informan HA pun yang mengatakan bahwa para bisu dan pemerintah hanya bersifat insitental atau pelibatan bisu hanya sebagai daya tarik dalam sebuah acara untuk memperkenalkan para budaya bisu baik dengan tarian magiri atau dengan pakaian kebudayaan para bisu.

Pernyataan diatas senada dengan pendapat informan yang berinisial S yang mengatakan bahwa:

“Partisipasi penyelenggaraan pemerintah sebenarnya bisu nda terlibat kalau orientasi pemerintahan dia hanya melakukan ritual-ritual ataukah pemerintah bikin suatu kegiatan baru dilibatkan jadi keterlibatan dipemerintah pada saat tertentu, pada saat tertentu tidaak melaksanakan kegiatan-kegiatan selaluu mau dibilang mau melaksanakan kegiatan pemerintahan padahal enda, jadii bisu itu nanti

dipake atau nanti diperlihatkan lagi kalau ada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sifatnya tingkat kabupaten atau provinsi” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan HA dan S Bissu tidak memiliki peran penting dalam agenda yang dilakukan pemerintah bissu hanya memiliki sebagai pelengkap dalam agenda-agenda tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Bissu hanya digunakan oleh pemerintah pada agenda-agenda yang tingkatan Kabupaten atau provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) pada bidang kajian *partisipasi button up* menunjukkan bahwa peran bissu dalam agenda pemerintahan adalah sesuai dengan kebutuhan kapan mereka akan digunakan dan bissu hanya sebagai pelengkap daya darik dalam sebuah acara untuk memperkenalkan para budaya bissu baik dengan tarian magiri atau dengan pakaian kebudayaan para bissu dalam agenda-agenda tertentu yang dilakukan oleh pemerintah.

### **3. Konsep Permusyawaratan**

Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dilakukan melalui penyambungan kembali keterpisahan antara negara dengan masyarakat melalui adanya ruang partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penikmat kebijakan-kebijakan pemerintah akan tetapi mulai bergeser menjadi pelaku/subjek lahirnya kebijakan. Baik demokrasi permusyawaratan maupun demokrasi deliberatif, menekankan peran partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. hal ini dilatar belakangi oleh kemunculan gagasan demokrasi dan



*good governance* yang memberikan ruang yang sangat besar terhadap partisipasi masyarakat.

**Tabel 3**

**Partisipasi Konsep Permusyawaratan Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep**

<b>Informan</b>	<b>Kelestarian budaya</b>	<b>Pro dan kontra</b>	<b>Pembangunan daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Ketua adat bissu	Bissu tetap bertahan sampai sekarang	Tidak ada pro kontra	Cuma janji tanpa bantuan yang diberikan
(Perangkat bissu)	Hanya dilirik pada saat dibutuhkan	Dari dulu tidak ada pro dan kontra	Cuma mendapatkan rumah
(Perangkat bissu)	Jika ada yang datang mengundang	Tidak ada masalah	Tidak ada perhatian pemerintah
Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	Sebaiknya itu harus bekerja sama dengan pemerintah	Selama ini liat tidak ada	Digerakan oleh pemerintah
Mantan anggota dpr (masyarakat)	Mudah termanfaatkan oleh daerah	Tidak sampai pro kontra	Tidak masuk kategori untuk dikembangkan
Mantan pengurus arajang (masyarakat)	Jika mereka mendapat gaji mereka akan bertahan	Tidak pernah	Tidak ada perhatian sampai sekarang
Camat segeri	Tetap memperhatikan pelaksanaan-pelaksanaannya	Tidak ada kontradiksi	Tetap mensupor bissu

Sumber : Hasil Reduksi Data 2019

- a. Pada tabel 3 merujuk pada Konsep permusyawaratan yang berfokus terhadap upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kebudayaan tradisional ini seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial S (Camat Segeri) yang mengatakan bahwa:

“Jadi pemerintah tetap mempertahankan bissu yang ada di Pangkep, jadi semua bissu bissu yang ada dari pemerintah tadi yang saya bilang tetap memperhatikan pelaksanaan-pelaksanaannya kalau akan dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, jadi tetap diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya yang digunakan bissu jadi pemerintah disini pemerintah dalam hal ini kepala dinas pariwisata yang menangani langsung bissu yang ada di segeri jadi dinas pariwisata

tetap memberikan perhatian-perhatian kepada bisu...” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata dengan pemerintah daerah tetap mempertahankan keberadaan para bisu dengan cara memperhatikan pelaksanaan-pelaksanaan agenda yang dilakukan oleh para bisu dan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan.

Dari hasil pernyataan informan S berbeda dengan dengan argumen dari informan inisial BN yang mengatakan bahwa:

*“iyee baa na’ bertahan bisu nasaba iya ro ana’ iya koe kacicemmi adakku lokka pada-padaku pa deto ku engka gosip ii de to nengka ku olliki ku salah-salah memenggi. Pareluki tu maseddi di bola rajangge aja lalo mu anu kupa d bola rajangge manre esso na rapiki wenni kupa d arajangge manre wenni de’togaga perhitungan waktunna eloki manre manreki supaya makessingi bisu lao diidi, agaro ku lokka di bolana pammatoa eloki minung wae pella na degaga eloki manre na de’ gaga lokkami ma lupu, jadi ku engka romai pole wartawan elo mitta bisu ku eloka na pabbicara ka iyyo na’ kira-kira mu areppa tu doi pabbarekke sumange makkutoi ha bisu apalagi pa matoa” “...iya bisu tetap bertahan karena saya hanya berkata satu kali saja kepada saudara-saudaraku karena saya tidak pernah menceritakan kejelekan mereka saya tidak pernah panggil jika mengenai hal yang salah atau kurang baik. kita perlu bersatu nak di rumah arajang biar kita makan siang di rumah arajang dan kalau kita dapat malam kita makan di arajang tidak ada perhitungan waktu kapan kalau kita mau kmakan kita makan supaya hubungan para bisu terjalin dengan baik dengan kita, apa yang saya dapatkan ketika ke rumah paammatoa kita mau minum air panas tapi tidak ada kita mau makan tapi tidak ada makanan kita hanya datang kelaparan jadi kalau ada wartawan yang datang untuk meliput kira-kira berapa yang bisa kamu berikan untuk pammatoa” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berinisial BN yang mempertahankan kebudayaan bisu dengan cara tetap merawat silaturahmi kepada para bisu-bisu yang ada di Pangkep. Berbeda halnya dengan pernyataan informan BN yang mengatakan bahwa:

*“iya idi bissue ku engkasi romai tau marola laosi ma bissu de’gaga doina iyaro cau manekki ya ku engka de’nasiaga na maegaki”*  
“...kami para bissu jika ada yang datang kemari mengundang kami pergi ma bissu tisak ada uang nya itulah yang membuat kami lelah walaupun ada itu tidak seberapa” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan BN mengatakan bahwa semakin lama semakin sedikit yang melakukan pementasan kebudayaan, hal ini dikarenakan kurangnya bayaran yang mereka dapatkan dari hasil pementasan tersebut.

Pendapat BN senada dengan pendapat informan yang berinisial BE yang mengatakan bahwa:

*“sebenarnya untuk itu cara mengantisipasi saya tidak bisa tau bagaimana caranya karena ini tradisi atas kesadaranya sendiri kalau masalah campur tangan pemerintah, pemerintah juga tidak bisa membentuk bibit-bibit bissu, jadi pemerintah begitu jadi kalau memang terlalu dibutuhkan yahh dilirik lagi jadi hanya waktu-waktu tertentu jadi bissu itu maunya setiap bulan ada dari mereka setidaknya untuk pemeliharaan dan kehidupannya mereka bahasa kasarnya mungkin gajilah yang harus dikasi ke bissu walaupun misalnya tidak semua bissu bisa dikasi mungkin bissu-bissu tua atau tertentu yah setidaknya pimpinan saja yang tinggal di arajang yang serba kekurnagan disana”* (Hasil Wawancara, 30 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dengan informan BN dan BE menunjukkan bahwa salah satu cara untuk melakukan pelestarian kebudayaan bissu adalah dengan adanya bantuan untuk para bissu untuk kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini diperkuat dengan argumen informan inisial M yang mengatakan bahwa:

*“kalau ada gajinya nanti tidak hilang tapi kalau tidak ada gajina hilang semua itu nanti bissu, bissu tidak ada lagi sekarang sekarang tinggal 4 mi bissu di segeri kalau sedikit tidak dikasi gaji nanti ini karena tidak ada ongkosna”* (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial AB yang memiliki pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwa:

“sebaiknya itu harus bekerja sama dengan pemerintah tapi yahh gimana yahh jadi untuk ini tidak artinya lenyap ini tradisi kami dari masyarakat mempertahankan, dikasi pisang mita sumbangan jadi kalau dihari pasar pada waktu itu misalnya kalau kita mau turun mau diarak belum ada bahan kita ke pasar biasa ada kasi beras kasi minyak kelapa kita ambil semua karena itu kita butuhkan bukan hanya uang kadang-kadang terdesak baru pemerintah kasibantuan, tapi kalau saya liat tahun-tahun kemrin ini pemerintah membantu tidak tau yang akan dayang krena kemarin-kemarnya itu kita saja yang bangunkan”

Informan yang berinisial AB berpendapat bahwa Seharusnya pemerintah melakukan kerja sama dengan para bissu untuk mempertahankann kebudayaan ini. Pernyataan diatas senada dengan pendapat informan yang berinisial HA yang mengatakan bahwa:

“kalau bertahan, sebetulnya tidak akan mati juga cuman dia tidak bisa besar kalau bertahan pasti bertahan karena ada saja pasti orang-orang belanda ada orang orang mau berkorban kepada dia kalau dia mau ambil program sarjananya kalau dia kan bawa penterjemah begini begini begini sehingga itu tidak bisa mati sebetulnya susah matikan dia karena yang kita lawan dunia iya kan yang yang susah untuk membesarkan sehingga mudah termanfaatkan oleh daerah andai kata jadi budaya muslim seperti di sunan anpel itu jalan masuk dari jalan raya itu bisa dipenuhi dengan penjual-jual jadi masyarakat tumbuh ekonominya kalau rame pengunjungnya seperti ini kuburannya Soekarno itu Cuma sekedar mau siarah Soekarno jadi kalau kita buat seperti itu disini pertumbuha ekonomi di daerah ini sudah bisa membantu lebih baik adri sekarang belum lagi wisatawan- wisatawan mancanegara itukan kalau ditambah daya tariknya itu pasti sebaiknya ini bekerja sama dengan pemerintah taapi untuk ini tidaakk artinya lenyap ini tradisi”

Dari hasil wawancara dengan informan AB dan HA menunjukkan bahwa salah satu cara melestarikan kebudayaan ini adalah dengan mengembangkannya dan ada kerjasama dengan pemerintah. Bissu akan tetap bertahan karena banyaknya wisatawan daerah bahkan sampai dari luar negeri untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan para bissu akan tetapi yang menajadi permasalahan adalah untuk membesarkan

kebudayaan ini sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh daerah. Inilah peran pemerintah melakukan pengembangan dengan kebudayaan ini dengan cara mengumpulkan beberapa kebudayaan pangkep lainnya dalam satu tempat yang berlokasi di tanah arajang segeri untuk dikembangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan dapat disimpulkan bahwa Konsep permusyawaratan yang berfokus terhadap upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kebudayaan tradisional ini seiring dengan perkembangan zaman semakin lama semakin sedikit yang melakukan pentas kebudayaan, hal ini dikarenakan kurangnya bayaran yang mereka dapatkan dari hasil pentas tersebut.

- b. Pada tabel 3 merujuk pada Konsep permusyawaratan yang berfokus terhadap pro dan kontra terkait dengan adanya tradisi adat bissu sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa konsep permusyawaratan antara pemerintah dengan para bissu bahwa harus dilakukan dengan baik sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial BE yang mengatakan bahwa:

“kalau pro dan kontra itu tidak ada dari dulu tidak ada pro dan kontra bissu juga tetap dilirik karena itu adalah asetnya juga pangkep dan bahkan di beberapa buku-buku pemandu wisata itu dibuat pemerintah khusus untuk itu panduan pariwisata dan dia banyak berbicara tentang bissu” (Hasil Wawancara, 30 Mei 2019).

Pernyataan BE mengatakan bahwa tidak ada pro dan kontra antara pemerintah dan bissu karena bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki

oleh Pangkep. Informan BN (Ketua adat bissu) pun berpendapat hal yang sama yang mengatakan bahwa:

“deto gaga na”

“tidak ada nak” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019)

Dari hasil wawancara diatas dengan informan BE dan BN menunjukkan bahwa tidak adanya permasalahan antara pemerintah dan para bissu.

Hal ini pun diperkuat oleh pernyataan informan yang berinisial BN yang mengatakan bahwa:

*“dena gaga masalah iyami diolo ro pammarentae elo na musnahkan bissue ne dena nallei musnahkanngi tetapki bertahang”* “...tidak ada masalah cuman dulu pemerintah mau memusnahkan bissu tapi tidak bisa musnahkan bissu tetap bertahan” (Hasil Wawancara, 30 Mei 2019).

Dari pernyataan informan tersebut diperkuat oleh pernyataan informan yang berinisial AB yang mengatakan bahwa:

“Kalau selama ini saya liat tidak ada...” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Pernyataan informan yang mengatakan bahwa tidak adanya pro dan kontra antara pemerintah dengan para bissu diperkuat dengan oeryataan informan yang berinisial AB dan M yang mengatakan bahwa:

“tidak sampai pro kontra” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

“tidak pernah kalau di segeri tidak pernah” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Hal ini pula setara dengan pernyataan informan yang berinisial S yang mengatakan bahwa:

“kalau kita di Pangkep khususnyaa Segeri tidak ada kontradiksi...” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pro dan kontra antara pemerintah dengan para bissu.

- c. Pada tabel 3 merujuk pada Konsep permusyawaratan yang berfokus terhadap peran badan permusyawaratan daerah dalam meningkatkan partisipasi Bissu dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini camat segeri yang berinisial S mengatakan bahwa tetap ada arahan dari badan permusyawaratan daerah sesuai dengan argumanya yang mengatakan bahwa:

“Badan permusyawaratan daerah jadi badan permusyawaratan daerah ataukah lembaga pemberdayaan masyarakat desa tingkat kabupaten tetap menspor bissu yang ada di Pangkep dan tetap memberikan kesempatan untuk bisa menghidupi bissu itu sendiri artinya disini selain bissu melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual di Pangkep mereka juga memberikan kesempatan bissu-bissu ini untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya ee ada sebagai tata rias, ada eee sebagai pedagang, ada juga yang sebagian kegiatannya, pokokny ada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh orang bissu. Kalau bantuan perekonomian tetap ada bantuan perokomian untuk khususnya di segeri pada umumnya Pangkep karena kenapa bissu itu bisa mendatangkan turis-turis luar negeri, eee bisa mendatangkan orang-orang lokal yang datang di Pangkep untuk melihat kegiatan-kegiatan bissu jadi sangat membantu perekonomian utamanya di Kecamatan Segeri” (Hasil Wawancara, 19 Juni 2019).

Badan permusyawaratan daerah tetap memperhatikan para bissu dan mereka pun mendapat bantuan dari pemerintah. Kehadiran para bissu di Pangkep akan meningkatkan perekonomian kecamatan segeri dengan mendatangkan turis-turis untuk berkunjung.

Bededa hal nya dengan pernyataan informan diatas informan dengan inisial BN yang mengatakan bahwa:

*“iyaro sedding na’ ku pada mabbicarai makessing mu padda makessing iyatommi ro baantungge de’gaaga tapi iya rodo ana’*

*mattajekka umpamana tapi iya mancaji pammatoa na kaburang mua bolah arajang tapi iyami ro anre de' na sesuai adanna biasa, jadi pelang-pelang tokka maccarita lokka kantoroe sappa ku de' naurususangga alena meto madosa usalai kampokku demi alena. eee ana' adapngenna pole cappa aje lettu gemme iya magana paeng ajana ku pauii laona ada iya ku de' kulao sappa laleng atuokku mulle parekka siaga tauna ana' de muengka parengga berre mu' cilice jaadi ku de' ku assu aga elo ku anre moro jaa ee padecenggenngi arajatta” “...itunak kalau mereka berbicara semua bagus hanya bantuan tidak ada tapi dulu nak saya menunggu misalanya tapi semenjak saya menjaadi pammatoa saya dibuatkan rumah arajang tapi hanya makan nya saja tidak sesuai dengan perkataanya sebelumnya, jadi pelan-pelan saya berbicara ke kantor mencari kalau mereka tidak memproses janjinya yahh mereka sendirilah yang akan dapat dosa saya meninggalkan kampung halaman demi mereka. eee kan sayaa minta mita maaf dari ujung kaki sampi rambut jasi bagaimana dengan saya tidak usah saya ungkapkan kalau saya tidak pergi mecari untuk kehidupan bisakah engkau berikan sama sudah berapa tahun nak tidak pernah berikan saya beras walau satu biji pun jadii kalau saya tidak keluar apa yang saya makan saya tinggal merawat arajang kebudataan kita” (Hasil Wawancara, 18 Juni 2019).*

Pemerintah telah membuatkan rumah arajanag akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bantuan perekonomian yang akan didapatkan setiap bulan yang telah disepakati sebelumnya nyatanya kebijakan tersebut tidak ter implementasi dengan baik.

Dari hasil pernyataan informan BN yang diperkuat dengan argumen dari informan inisial BE yang mengatakan bahwa:

“saya rasa tidak terlalu banyak kalau masalah itu Cuma kita tidak enak kalau bilang tidak ada krena dia bikin rumah itu” (haisl Wawancara, 30 Mei 2019).

Berdasarkan hasil waawancara yang diperoleh dari informan yang berinisial BN dan BE mengatakan bahwa bantuan yang diberikan hanya rumah dan bantuan yang selalu dijanjikankepada mereka tidak pernah sampai. Hal ini diperkuat dengan argumen informan BN yang mengatakan bahwa:



*“de’ gaga perhaatianna pammarentae, fa ngala talami bantuki fa ngala tala parekki fa engka na aseng na arekki tapi de’gaga lettu engka na aseng hadiana bissue ta sikohe naseng ta sitaung mappulo juta na de’gaga lettu”* “...Tidak ada perhatian dari pemerintah, hanya Allah yang membantu kami mereka mengatakan ada yang mereka berikan tapi nyatanya tidak ada yang sampai katanya bissue punya hadiah segini per orang puluhan juta tapi tidak ada sampai” (Wawancara 18 Juni 2019).

Dari hasil pernyataan informan BN yang mengatakan bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah hanya janji yang mereka terima yang mengatakan bahwa akan mendapatkan bantuan setiap bulan akan tetapi hal itu tak kunjung sampai. Hal ini diperkuat dengan argumen dari informan inisial AB yang mengatakan bahwa:

“Bissue ini hanya digerakan misalnya ini ada keperluan pemerintah untuk dipake kalau untuk pembangunan-pembangunan lain saya liat jarang dilibatkan” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Pendapat AB mengatakan bahwa bissue hanya digunakan pada agenda pemerintahan hal ini senada dengan pendapat informan yang berinisial M yang mengatakan bahwa:

“tidak pernah kalau disegeri kalau di kabupaten biasa juga kalau di segeri tidak ada, tidak diperhatikan sampai sekarang sedangkan pangkajenne saja tidak diperhatikan selalu dijanji-dijanji tapi tidak ada” (Hasil Wawancara, 21 Juni 2019).

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa informan diatas berbeda dengan argumen informan yang berinisial HA yang mengatakan bahwa:

“emmm tidak masuk dalam kategori mau dikembangkan hanya di bake up kebutuhannya tidak ada niatan dari pemerintah untuk membesarkannya karena itu tadi jangan sampai kalau mau dibesarkan tanpa arah yang jelas saya belum pernah dengar itu karena yang dikembangkan oleh pemerintah daerah hanya pariwisatanya seperti ada pulau anu disini yang dekat sedangkan yang ada ini pemerintah tidak sanggup karena tidak menghasilkan seperti anu ini setelah lewat tonasa tangga seribu pemerintah sudah

biayai tapi merasa tidak ada hasilnyaaa buang-buang uang saja sudah dipromosi diapa tapi tidak isa perlu itu dibina karena betul-betul dijadikan aset karena pengakuan dari raja-raja baik di Bone maupun disini dulu itu hanya perangkat perangkat apa namanya perangkat kerajaan bahasa bugisnya dia pa llapi aro pasukan inti karena dia terdiri dari orang-orang kebal karena dia selalu di ling satu kalau ada penampilan raja dulu pasukan pasukan biasa kan jauh kalau dia ii di ling satu dia sai memang diansalkan tidak mempan dengan senjata tajam yaa kebal” (Hasil Wawancara, 20 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan M dan HA menunjukkan bahwa kebudayaan ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan jika hal ini tidak termasuk dalam kategori yang harus dikembangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep permusyawaratan pelestarian budaya bissu seiring dengan perkembangan zaman budaya bissu semakin tersingkirkan hal ini dikarenakan tidak adanya bantuan ataupun hasil yang memuaskan bagi para bissu untuk tetep bertahan melestarikan kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) pada bidang kajian konsep permusyawaratan bahwa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kebudayaan tradisional ini seiring dengan perkembangan zaman semakin lama semakin sedikit yang melakukan pementasan kebudayaan, hal ini dikarenakan kurangnya bayaran yang mereka dapatkan dari hasil pementasan tersebut dan salah satu cara melestarikan kebudayaan ini adalah dengan mengembangkannya dan ada kerjasama dengan pemerintah akan tetapi budaya bissu tidak mendapat perhatian dari pemerintah termasuk dalam kategori yang tidak harus dikembangkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep), aka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebudayaan bissu hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya bantuan prasarana yang mereka dapatkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan pelibatan para bissu dalam agenda pemerintahan hanya dilakukan ada waktu-waktu tertentu sehingga hal ini menyebabkan kurangnya persatuan antara pemerintah dan bissu dalam upaya pemberdayaan budaya bissu yang meyebabkan mudahnya termanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memberikan hasil bagi mereka dalam melakukan penjualan kebudayaan;
- 2) Peran bissu dalam agenda pemerintahan adalah sesuai dengan kebutuhan kapan mereka akan digunakan dan bissu hanya sebagai pelengkap daya darik dalam sebuah acara untuk memperkanlkan para budaya bissu baik dengan tarian magiri atau dengan pakaian kebudayaan para bissu dalam agenda-agenda tertentu yang dilakukan oleh pemerintah;
- 3) Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kebudayaan tradisional ini seiring dengan perkembangan zaman semakin lama semakin sedikit yang melakukan pementasan kebudayaan, hal ini dikarenakan kurangnya bayaran yang mereka dapatkan dari hasil pementasan tersebut dan salah satu cara melestarikan kebudayaan ini adalah dengan mengembangkannya dan ada

kerjasama dengan pemerintah akan tetapi budaya bissu tidak mendapat perhatian dari pemerintah termasuk dalam kategori yang tidak harus dikembangkan.

## **B. Saran**

Adapun masalah-masalah yang ditemui penulis saat melaksanakan penelitian mengenai Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri kabupaten Pangkep), maka diperoleh saran/masukan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Diharapkan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kecamatan Segeri kabupaten Pangkep untuk senantiasa merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan bissu dan mengikut sertakan beberapa *stake holders* salah satunya adalah pelibatan para bissu dalam proses perumusan kebijakan tersebut.
2. Diharapkan bagi pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan keberlangsungan budaya bissu dan pelibatan bissu dalam berbagai agenda sebagai upaya pelestarian budaya bissu
3. Diharapkan bagi seluruh masyarakat dalam hal ini para bissu lebih meningkatkan antusiasnya dalam keikutsertaan berbagai agenda pemerintahan dan mencegah upaya dalam penjualan kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneta Asna, 2010. *Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kota makassar*. Jurnal administrasi publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Abady Puspari Aryati. 2013. *Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah participatory planning in local development*. vol. III no.1 april 2013
- Aditya Firman Zaka, Al-Fatih Sholahuddin. 2016. Reaktualisasi demokrasi permusyawaratan dalam pembuatan kebijakan publik yang partisipatif dan bermoral
- Bahfiarti Tuti, Oktober 2011, *Mistifikasi 'bissu' dalam upacara ritual adat etnik bugis makassar (kajian studi dramaturgi)*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011
- Bintari Antik, Oktober 2016. *Formulasi kebijakan pemerintah tentang pembentukan badan usaha milik daerah (bumd) perseroan terbatas (pt) mass rapid transit (mrt) jakarta di provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.2 No.2, Oktober 2016
- BPNN Sulsel. 2017. *Eksistensi Bissu di Bone dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal di Kabupaten Bone*. [www.kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id) Dikases pada 20 Desember 2018
- Febriyandi didi, 2015. *Proses perumusan kebijakan pemekaran daerah (studi di pulausebatik kabupaten nunukan kalimantan utara)*. Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015
- Fischer Frank, 2010. *Participatory Governance*. Jerusalem papers in regulation & Governance. Working Paper No.24 Agustus 2010
- Hardiansya Ancha, Djaya Baso Andi. 2017. *Bissu, gender kelima dari tanah Bugis*, [www.britagar.id](http://www.britagar.id).
- LeRoux Kelly. 2009. *Paternalistic or Participatory governance? Examining Opportunities for client participation in nonprofit social service organizations*. Public administration review. University of Kansas
- Muhammadiyah. 2013. *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah*. Jurnal Vol.III No.1 April 2013
- Said Muh. *Peran bissu pada masyarakat bugis*. seminar nasional. Universitas Negeri Makassar
- Suliyati Titiek. 2018. *Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis*. Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol.2 No.1 Desember 2018

Syahrul. 2013. *Menjadi Muslim yang Aminis; telaah Identitas Bissu Segeri di Kabupaten Pangkep*, dalam Al-Fikr Volume 17 Nomor 13 Tahun 2013

Sirajuddin Arief Ilham, 2014. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassa*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014

Syamsuddin. 2010. *Studi Fenomenologi Dinamika Psikologi Peran Gender Bissu*, Tesis: Fakultas Psikologi UGM

Titiswasanany Winantuningtyas. 2013. *Democratic Governance dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Sekretaris Jenderal DPR-RI Sejak Februari 2013

Wampler, B., & McNulty, S.L. (2011). *Is governance managed participation important? exploring the nature and reforms of participatory reform*. wasington, DC: Center for international intellectual woodrow wilson

Yasir Armen dan Ridlwan Zulkarnain, Mei-Agustus 2012. *Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012

#### **Buku**

Afit Sya Syaiful. 2016. *Falsafah kebudayaan pancasila: Nilai dan kontradiksi sosialnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Leo Agustio, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 96

Nugroho D. Riant, 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Cet. Pertama), Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar

Sugiono. 2015. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Wahab, S.A. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center For Academic Publising service

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 14 tahun 2008

Permempnan No. 04 Tahun 2007

L

A

M

P

I

R

A

N









**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email : [fisip@unismuh.ac.id](mailto:fisip@unismuh.ac.id)  
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 1116/FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019-M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Hasriati  
Stambuk : 105610533715  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kabupaten Pangkep.  
Judul Skripsi : ***"Model Partisipatory Governance (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 16 Mei 2019

D e k a n,

Ub. Wakil Dekan I

  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM. 1084 366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail:lp3munismuhz@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1488/05/C.4-VIII/III/1440/2019

11 Ramadhan 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Pangkep

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di –

Pangkep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1116/FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 16 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HASRIATI**

No. Stambuk : **10561 0533715**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Model Partisipatory Governace (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2019 s/d 18 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.**

**NBM 101 7716**

05-19

2019



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 24 Mei 2019

K e p a d a,

Nomor : 070/ /V/ KKBP/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Yth . Camat Segeri Kab. Pangkep  
Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1116/FSP/A.6-VIII/V/1440 2019 Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **HASRIATI**  
No.Stambuk : 10561 0533715  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan *skripsi* dengan judul :

**“MODEL PARTISIPATORY GOVERNANCE (PERUMUSAN KEBIJAKAN ADAT BISSU SEGERI KABUPATEN PANGKEP)”**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 18 Mei s/d 18 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan *mevetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat
4. Menyerahkan 2 (Dua) exemplar copy hasil “PENELITIAN” kepada Bupati Pangkep Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Balitbangda.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya,-

An. KEPALA KANTOR  
Kasubag Tata Usaha

**ANDI YUNARTI M, S.STP**

Penata Tk. 1

19790625 199912 2 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth

1. Bupati Pangkep di Pangkajene;
2. Kepala Balitbangda Kab. Pangkep di Pangkajene;
3. Ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar ;

**Sdr(i) HASRIATI;**

----- *Pertinggal* -----



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
KECAMATAN SEGERI

Alamat : Jl. A. S. Dg. Kalebbu Kec. Segeri Telp (0410) 231237 KODE POS 90655

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Nomor : 194 /KS /VII/2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : HASRIATI  
Nomor Stambuk : 10561 0533715  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (i)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Wilayah Kecamatan Segeri mulai Tanggal 18 Mei s/d 18 Juli 2019, dalam rangka Penyusunan Tesis Dengan Judul " MODEL PARTISIPATORY GOVERNANCE (PERUMUSAN KEBIJAKAN ADAT BISSU SEGERI KABUPATEN PANGKEP "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Segeri, 18 Juli 2019



Tembusan: disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Kab. Pangkep (sebagai laporan)  
di - Pangkajene  
Pertanggal, ----

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Camat Segeri Pangkep



Wawancara dengan Pamatoa Bissu Nani



Wawancara dengan Bissu Eka



Wawancara dengan Bissu Perempuan (Bissu Nisa)



Wawancara dengan Pemangku adat Segeri Pangkep



Wawancara dengan masyarakat

## DRAF WAWANCARA

### *Model Participatory Governance*

(Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)

#### A. Orientasi Praktis

1. Apakah ada kebijakan tentang bissu?
2. Bagaimana pemerintah melibatkan Bissu? (Dalam kegiatan apa saja)
3. Bagaimana peran Bissu dalam penyelenggaraan pemerintahan?  
(Pemberdayaan budaya bissu)
4. Seperti apa orientasi praktis antara pemerintah dan bissu (Kolaborasi)

#### B. Partisipasi Bissu

1. Bagaimana partisipasi Bissu dalam penyelenggaraan pemerintahan

#### C. Konsep Permusyawaratan

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kebudayaan tradisional ini seiring dengan perkembangan zaman?
2. Apakah ada pro dan kontra terkait dengan adanya tradisi adat bissu sampai sekarang?
3. Apakah peran badan permusyawaratan daerah dalam meningkatkan partisipasi Bissu dalam pembangunan daerah?



#### D. Orientasi Praktis

1. Apakah ada kebijakan tentang bisu?

NO	INFORMAN	KEBIJAKAN
1	Ketua adat bisu	<p>Bissu Nani</p> <p>iyarodo labeke na' pammatoa engkamaneng bantuanna engka galunna biasa dua hetto engka togalunna ro panggenrangge enka to galunna iyarodo pemangku ade ee engka too panggurursuna arajangge engka to galunna yaa selaing ana' iyaro pemangku ada biasa jadi iyaro pemangku ada biasa manggaku maneng iyaro jadi taung-taung mateni pammatoa lebbini kapang dua pulo taung, lebbini dua pulo taung matena pammatoa ede'ni gaga, denagaga baantuang salamana roo na' puraka dilantik engkana dua taung depa gaga bantuanna tumai eee tebbere, teegabah teng iyaro galungge, tedoi de' gaga balanca na arekka eso-eso iyaro wettunna te mallanti ana' de' dipasitinajai fenno yaeddi lapangangge diolo engka manenni pak bupati, dpr, cama' engka manenni kedda wa' nani jaddi pammatoa dibacani yasingge difasumpana pak cama te sumpai selain ro ana' batena maccarita de' dipasitinajai pammarenta engka manenggi saksiannnga na de'gaga bantuang na rengga makkedai ro waktukku dilantaik pa engka manegi bupati aga metteki aro denre bissue seddi makedda sedi juta kasi arengi si huleng tappa mette aro pak cama kedda seddina juta si tengga madaena ku sihuleng de'wita gaga na' dua taunna fura dilantik jadi ku dikumpuluki ro dua taungge siagani 10 huleng siaga memenni ee ko sitaung maing-maing dua pulo juta aroo laona ada jaji iya to kasi sappa sendirina degaga bantuan paling wanu pale ku engka makkutana, jadi iya rodo wattuku na seddi masyarakake mai cama' makessing naseng puang ke iyaa decennaa naseng de' gaga kasi ku anre anu ku tiwi manemi pole kampokku ku desi gaga berre lokasika kasi sappa bere ku bolae ee cappu berreku iyaro bettuanna na' biasaka bettuanna pikiriiki makkeda heemmm na pakuakku sedding pammarenta te berre na rekka to</p>

teng pembagian to iyaro bettuanna adanna de ro ku caritai ya ku umpamana degaga ro assiadangge biasa iyanaro berre pembageangge yaa pattamana kero rasking pammatoa kasi' arenni ta sikarung si huleng umpamana ciceng de'gaga iya toha ndo sappa na engka ku anre

jadi na' dulu itu semua pammatoa mendapat bantuan dia punya sawah seluas 2 km pemain gendang juga punya sawah, pemangku adat juga punya sawah, pengurus arajang juga mempunyai sawah, jadi nak selain itu pemangku adat dulu jadi semua bersedia menjadi pemangku adat. setelah beberapa tahun meninggalnya pammatoa kurang lebih dua puluh tahun, setelah meninggal ehh sudah tidak ada lagi bantuan sudah tidak ada lagi bantuan selama itu nak, setelah dilantik sudah ada dua tahun belum ada bantuan tanpa beras, tanpa padi, tanpa sawah itu, tanpaa uang tidak ada uang belanja setia hari yang saya dapat. Waktu saya pelantikan nak tidak sebanding lapangan depan penuh semua pak bupati, dpr, camaat, semu datang menyaksikan pelantikan wa' Nani menjadi pammatoa dan yasin pun dikomandangkan dan disumpahakan oleh pak camat selain itu nak cara pemerintah bercerita tidak sesuai semua datang menyaksikan tapi tidak ada bantuan sedikit pun yang mereka berikan mereka pu berkata waktu saya dilaantik karena semua bupati apaa semua datang dan salah satu bissu pun berkata cukuplah satu juta perbulan dan pak samat pun langsung berkata satu juta stengah dalam satu bulan cukuplah itu, tidak asa saya liat nak saya sudah dilantik selama dua tahun jadi kalau selama dua tahun itu dikumpulkan sudah berapa 10 bulan berapa ee kalau satu tahun main-main dua puluh juta itu cuma janji jadi saya mencari sendiri tidak ada bantuan paling kalau ada yang bertanya, jadi waktu saya dilantik masyarakat, camat berkata semua baagung puang alhamdulillah, tidak ada yang dapat saya makan semua saya bawa dariaa kampung halaman saya kalau beras habis saya pergi mencari beras d kampung halaman saya ee beras saya habis artinya nak biasa saya berpikir nak kalau heemmm kenapa pemerintah melakukan seperti ini sama saya tanpa beras mereka berikan tanpa pembagian juga itu arti dari ucapannya saya

		tidak menceritakan kejelekannya tapi seandainya tidak ada dari hasil pembicaraan dulu cukuplah masukkan saya dikelompokkan miskin pammatoa cukuplah berikan satu karung satu bulan misalnya tapi tidak ada saya sendiri nak mencari supaya bisa makan.
2	(Perangkat Bissu)	<p>Bissu Eka</p> <p>Jadi Kebijakan pemerintah itu kontribusinya ke Bissu itu banyak karena ini bukan lagi sebagai kerajaan jadi otomatis nilai-nilai dan kepercayaan akan Bissu itu makin berkurang terus pemerintah mengambil alih agar Bissu tidak pukah makanya rumah arajang yang beberapa puluh tahun itu hancur roboh diganti oleh pemerintah walaupun rumah itu dari rumah BKKBN dialih fungsikan jadi rumah arajang untuk sementara baru tahun kemarin baru selesai dibuat dikikinkan rumah sesungguhnya. Tapi termasuk pemerintah memfasilitasi 1. rumah, 2. penerangannya sekali-kali juga pemerintah menghadirkan mereka diacara-acara tertentu termasuk dalam upacara penyambutan, penyambutan tamu atau acara-acara ritual lainnya termasuk upacara penyambutan bupati.</p>
3	(Perangkat Bissu)	<p>Bissu Nisa</p> <p>Degaga na' de' denagaga bantuan na rekki ya ku engka bantuan degaga lettu na' yabahang ro jasa bissuku fole d haling, ee iyaro dari bissuemakuae engka gajinna engka anunna huleng puleng na de'gaga ku tania idi nruntu berre pammarenta de'gaga engka gah kero na fau ku engka bantuang na renggi taue de'gaga denapa gaga lettu selong maneka kasi ro lao juppandang biasa ro na kan na pau bawang mi, dena gaga kebijakan atau bantuan aga tumai iyaro na cauki ya kuonro d bolaku, ku engka mollika tea tonna lao, enjana mu panreki balancaiki ku de'pale mu balancaiki arenni mai doi na engka di anggeliang fa paakutossiharo idi jagaiki eddi kebudayaannge</p> <p>Tidak ada nak tidak ada bantuan yang diberikan kalau pun ada bantuan tidak ada yang sampai nak yang ada cuman</p>

		<p>jasa bisu dari halim, ee bisu itu punya gaji yang mereka dapat setiap bulan tapi tidak ada kalau kita tidak dapat beras dari pemerintah tidak ada adakah yang mereka katakan kalau ada bantuan yang diberikan kepada kami belum ada yang sampai saya sama dengan mereka ke Makassar mereka menjanjikan, tidak ada kebijakan atau bantuan apakah yang mereka berikan kepada kami itulah yang membuat kami capek, itulah mengapa saya cuma tinggal dirumah, kalau ada yang mengundang saya sudah tidak mau pergi, tidak usah kau berikan makanan cukuplah belanjakan kami kalau tidak bisa belanjakan cukuplah dengan berikan uang untuk kami gunakan karena begitulah kami yang menjaga ini kebiasaan supaya tetap ada</p>
4	<p>Pemangku adat Segeri (Masyarakat)</p>	<p>A. Ali Baso Bombong</p> <p>Begitulah kayaknya ini pemerintah kayaknya tidak terlalu anu tidak terlalu peduli karena pemborosan tidak seperti camat yaang orang segeri disini yang bernama A. Satta itu dia yang turun tangan ada dulu, tapi ada jug bantuanya pemerintah tapi tidak terlalu banyak jadi swadaya masyarakat saja yah</p>
5	<p>Mantan Anggota DPR (Masyarakat)</p>	<p>H. Abu bakar sapa</p> <p>ini pemerintah hanya memfasilitasi dalam bentuk yahh dibantu perbaiki tempatnya disana bahkan ada dari salah satu anggota dewan dulu mengatakan mau membikin bahwa disekitar rumah bisu itu dijadikan apa namanya kayak di jokja ada namanya ee apa namanya ee itukan ditembok tinggi sudah mendekati anu tapi lebih kecil maunya dia rumah-rumah di dalam diambil alih oleh pemerintah kemudain ada rumah apa-rumah apa kemudian menghimpun budaya yang ada disini dan saat itu sudah memberi dana 300 juta untuk dibangun itu enda tau sekarang ini krena hampir setiap tahun ini dikasi dana karena mereka juga pake dana banyak seperti kalau mattedu arajang itu kan mereka rame-rame disana konsumsinya ada peralatan-peralatan yang diperbaharui seragamnya apa macam-macam sehingga dari pihak eee apa namanya pariwisata pangkep itu pasti ada program tahunannya disitu</p>

		di bakeup terus sama pemerintah karena ini aset negara bukan cuman aset daerah
6	Mantan Pengurus Arajang	Pak Making tidak ada dari dulu sampai sekarang tidak diperhatikan sampai sekarang
7	Camat Segeri	Pak Syahrul Pemerintah itu perhatiannya kepada bissu besar sekali terutama di kecamatan segeri terutama mengenai fasilitasnya, tempat jadi baru-baru ini pemerintah melalui dinas pariwisata membangun rumah fasilitas tempat, setiap ada kegiatan-kegiatan selalu didukung oleh pemerintahnya tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selalu didukung oleh pemerintah tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bissu seperti kalau keluar ke daerah itu masing-masing eee melaksanakan sesuai dengan pembicaraan yang mau pakai jadi pemerintah disii saja membantu memfasilitasi saja, fasilitasi rumah saja kalau dia keluar daerah sesuai dengan pembicaraan yang mau pakai kalau ada pihak ketigaa yang mau pake jika pemerintah dari daerah lain yang mengundang untuk perkrnalan budaya tetapi pihak ketida yang memfasilitasi, jadiseumpama biasa kalau dari provinsi provinsi yang biyai kalau dia ke pusat, pusat yang biyai

2. Bagaimana pemerintah melibatkan Bissu? (Dalam kegiatan apa saja)

NO	INFORMAN	PELIBATAN BISSU
1	Ketua adat bissu	<p>Bissu Nani</p> <p>biasana yakoo atau engka gubernur romai fole jakarta dijempuki atau elomi mappabotting aga</p> <p>biasanya kalau ada kegiatan pemerintah seperti kedatangan gubernur dari jakarta dijemput atau Cuma dengan acara pernikahan atau apa</p>
2	(Perangkat Bissu)	<p>Bissu Eka</p> <p>Kemarin kegiatan pemerintah yang melibatkan bissu itu hari jadi pangkep terus ada pencongklingan bissu juga terlibat pesta panen tingkat kabupaten pameran pembangunan</p>
3	(Perangkat Bissu)	<p>Bissu Nisa</p> <p>iyaa, yakunaollini te lao ma deppu lao pentas laoki maccarita pakko-pakko. Naollini mai tauwe ma bissu bangsa funggawana polisie fa abiasanenafa bissupa, fammarentae gaha, iya syaleleu bissu makkunrai</p> <p>iyaa, kalau mereka mengundang kami untuk pentas atau menghadiri sebuah acara untuk memperkenalkan bissu bagaimana dengan bissu. mereka mengundang kami ma bissu biasanya pada kegiatan acara kepolisian yang memerlukan antraksi bissu atau pemerintah, saya adalah bissu perempuan satu-satunya</p>
4	Pemangku adat Segeri	A. Ali Baso Bombong

	(Masyarakat)	<p>kalau sebenarnya menurut struktur kerajaan itu tidak boleh sembarangan itu tapi zaman sekarang ini kayaknya dijual adat inilah yang susah, apa sebabnya begitu karena ini bissu-bissu ini tidak punya penghasilan jadi bagaimana cara untuk bisa pigi artinya ditempat ramai atau apa maggiri mendapatkan uang sebenarnya tidak boleh begitu tidak boleh sama sekali dijual itu adat, dijual namanya itu sekarang ini yah seperti yang saya bilang tadi bagaimana perhatian pemerintah yang seharusnya begitu bagaimana caranya untuk hidup jadi ini kepala bissunya yang bernama nani pammatoa yang tinggal disini dia tidak punya penghasilan hanya misalnya kalau ada orang yang pigi bawakan pisang uang dua puluh ribu apakah itu cukup yah memang sebenarnya tujuannya sperti itu seperti zaman kerajaan seperti zaman dulu zaman kerajaan seperti setiap ada tamu atau raja ada pestanya seperti sekarang ini kalau misalnya ini ada calon bupati atau calon gubernur itu bisa diundang itu bissu tapi kalau untuk pengantin-pengantin itu dijual itu bissu tapi kita mau tekan bagaimana caranya kita pun tidak bisa kasi makanan itu bissu rata-rata banyak kepandaiannya utamanya pandai makindo botting pandai mabeppa</p>
5	Mantan Anggota DPR (Masyarakat)	<p>H. Abu bakar sapa seperti ada gubernur, kepala daerah yahh baru digerakkan kalau tidak yah tidur saja d seblah hahaha</p>
6	Mantan Pengurus Arajang (Masyarakat)	<p>Pak Making pelibatan bissu kegiatan pemerintah, biasanji kalau dari provinsi kalau disini tidak itu tadi foto dari iring itu tadi kalau disini tidak tidak pernah kalau disegeri kalau di kabupaten biasa</p>
7	Camat Segeri	<p>Pak Syahrul kadang, kalau adaaa acara kegiatan di kaupaten itu ditingkat-tingkat provensi atau tingkat nasional itu biasa ditampilkan eee bissunya supaya dari kabupaten-kabupaten lain bisa lebih mengenal lagi bahwa bissu itu begini ada di Pangkep ini tari-tariannyaa yang ada di Pangkep</p>

3. Bagaimana peran Bissu dlam penyelenggaraan pemerintahan? (Pemberdayaan budaya bissu)

NO	INFORMAN	PEMBERDAYAAN BUDAYA BISSU
1	Ketua adat bissu	<p>Bissu Nani</p> <p>Naolli, ku engka addena na' elo na pogau nappa mattariolo na bissupa na rekeng elo laksanakan ma bissu pa tauwe na siaga elo mu arekka ana' pa ku padang metoi haa ana' kude mu rekka kasi pabarekke sumange dena tu kasi gaga na wedding dipake paa iyaro pakokoe bissue umpamana pa kuni dialeta maccarita yaku degaga doi de' diullei massu paa eloki melli bensing apalagi ku koeki d bolae ana' eloki melli golla, eloki melli kofi, eloki melli teng, elonni melli pejje eloni melli pissing, iyaro jadi ku degaga na' lebbiki ku monroka di bolae tudang umpamana jadi ku engka tumai anunna pammarenta ke adampengannga na' pakogi tumai apa iya ro pa iyaro wita bissu-bissue ana' dena wita gaga elo loka maccule bawang padatoni pa rabanae, pa genrang-genrangge, pammecae pakuttoni ro kapang bissue yaku dioliki na ddegege doinaa ne to naelo, de naelo makkedai aga uala lao na engka aga-gakku ku parakai dimunri lenye amenggi maga ammengi agana ku anre ko lisuka jadi lebbiki menyengge bage duai elona teanna, tapi engkai romai denro makedai matamani puang itu anutta berre na doi ke iyana buttina arekka mai, arkka mai sure ku mattamani pa kudada sure dena to na wedding yang penting engkani taa cata keroe kantoro makkoe lokani mu terima sihulengge utihini aro pa ku degaga mu beberekka tu asenna laoma tu mabbenaggi siriku, pa iya ana' degaga sekolaku tapi pikkirankku wisseng yaku majaki macedeng patujui de kau de na patujui wisseto na napatujui wisseng to jadi iyaro bisseu elopi bittuana engka acara nappa lao disappa jadi alenaparo pammatoa</p>



manggakui kedda siaga gajinna seddi bissu ana' 300 sebbu sedidi tau, yaku de' na 300 seddi tau 200 seddi tau pakkumi ro panggenrangge jadi enneng ratuna pekero iyaro bissue hedima ta 200 yakoo de' pale naullei sedangkang ku acara-acara bolan mi na' degaga elo malai ku 50 mi sebbu 100 pa sebbu salah-salai 200 pakkero iyamiro jadi iya degaga acaraku koe ku de' kufangaku memenggi ro tamue jadi kira-kira na' kuoloki diacculenag bissu siaga memang elo muhaja kasi dibage-bageappa itu paggenrangge aga, pa gong, pa bissu ya ku de' ana' sappaki laingge ii na denawedding puang pa idi makkateni anunna bisue uwaga tommina ku wolli bawami na mate sirika de gaga elo lao pakkumiro gasyinna nak

dipanggil, kalau ada keperluannya nak yang mau mereka laksanakan tapi bissu yang mereka mau gunakan yahh kita ma bissu berapa yang bisa kamu berikan nak karena saya memang sudah sampaikan nak kalau kau tidak memberikan sedikit tidak ada yang bisa dipake karena bissu umpamanya kalau kita kalau kita tidak punya uang kita tidak bisa keluar karena kita mau membeli bensin apalagi kaalau kita untuk kebutuhan sehari-hari d rumah kita mau membeli gula, membeli kopi, membeli teh, mau belli garam, mau belli micin itulah jadi kalau tidak ada nak mending saya tinggal di rumah duduk santai misalnya jadi kalau ada yang datang kemari misalnya pemerintah saya minta maaf nak bagaimana ini krena ini saya liat para bissu nak' sudah tidak ada yang mau datang dengan sekedar bermain seperti pemain rebana, pemain gendag pencak silat begitu pula dnegan para pemain bissu kalau ada panggilan tapi tidak ada dana mereka juga tidak mau, mereka tidak mau mereka merkata apa apa yang saya dapatkan jika saya pergi sedangkan barang-barang saya yang saya bisa perbaiki dibelakang jangan sampai kemudian saya tinggalkan barang saya hilang apa yang akan saya makan kalau saya balik jadi llebih baik saya tinggal ½ kemaunya dan tidaknya tapi tadi merekaa kembali dan mengatakan bahwa bantuan sudah masuk beras dan uang dan berikan saya bukti berikan saya surat kalau sudah masuk karena tanpa surat juga tidak bisa yang

		<p>penting sudah tertera di kantor kamu terima dan pergi mengambil satu bulan kemudian saya bawa suratnya karena kalau tidak ada kamu permalukan saya namanya karena saya nak tidak punya pendidikan sekolah tapi pikiran saya tau kalau buruk dan baik dibetulkan atau tiadak saya juga tau dibetulkan saya juga tauuu jadi bissu dalam artian ketika ada acara baru mereka dicari jadi pammatoalah menanyakan berapa gaji setiap bissu nak Rp.300.000 per orang kalau tidak cukuplah Rp.200.000 per orang begitu pula dengan pemain gendang jadi semua Rp.600.000 kalau bissu bolehlah Rp.200.000 kalau tidak sanggup sedangkan ketika Cuma acara rumah saja tidak ada yang mau menerima ketika Cuma mendapat Rp.50.000 minimal Rp.100.000 atau Rp.200.000 lah yahah begitulah ajdi saya tidak mau menerima sebelum tamu enyetujui berapa biaya yang akan mereka berikan jika mau menggunakan bissu dalam kegiatan mereka krena mereka semua dapat pemain gendang, pemain gong, pa bissu kalau tidak nak silahkan cari yang lain katanya tidak bisa puang karena Anda yang memegang kekuasaan bissu maulah diapa nak kalau saya Cuma panggil saya mereka saya yang akan malu karena tidak ada yang akan datang begitulah intinya nak</p>
2	Perangkat Bissu	<p>Bissu Eka</p> <p>Bissu mempunyai peranan dalam pemerintah sebagai tokoh yang dituakan</p>
3	Perangkat Bissu	<p>Bissu Nisa</p> <p>iyaro diolo bissupa pakedoi ku engka gauna kutania bissu dena naelo, iya idi bissue ku engkasi romai tau marola laosi ma bissu marola asenna difigaurang anunna nappa diareng doi</p> <p>pada zaman dulu semua kegiatan menggunakan bissu dalam berbagai kegiatan berkatraksi mereka tidak mau kalau tanapa bissu, mereka para bissu ketika ada yang mengundang mereka akan menghadiri untuk magiri kita datang pentas memenuhi permintaan mereka dan memberikan kami uang</p>

4	Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	<p>A. Ali Baso Bombong</p> <p>pemberdayaan selama ini kayaknya tidak ada saya liaat maunya begitu sebenarnya supada bissu ini maju kalau mau saya ini dilibatkan anak sekolahtari-tarian atau apatapi pemerintah cumaa menjanjikan dan taulah masyarakat sekarang boleh dikatakan sudah pandai internet pikiran nya maju seharusnya ini ditangani kebudayaan atau pariwisata tapi seakan-akan itu kalau ada biaya dari pusat saya tidak tau ke mana sampai hilang di pangkep, ini dulu punya motor punya apa artinya punya perlengkapan bissu tapi tidak ada sampai sini yaj kita tidak menuntut tapi kenapa tidak saampai, seperti yang tadi saya katakan pemerintah anuu bukan tidak peduli taapi kalau sudah ramai ikut dia meramaikan tapi disaat kita menderita dia tidak mau menengok</p>
5	Mantan Anggota DPR (Masyarakat)	<p>H. Abu bakar sapa</p> <p>yahh kalau aa ada kaitannya dengan budaya seperti ada beberapa tahun itu ada temu budaya sangat rame bahkan diseminarkan itu bahkan bissu segeri masuk disini kan perna ada kerajaan terbesar dan tertua dari sulawesi selatan yang berkedudukan di Bungoro itu raja siam namanya meskipun kerajaan segeri erdiri sendiri karena sebetulnya kerajaan segeri adalah pecahaan dari Bone ada dulu keluarga raja Bonemungkin tidak tau apa penyebabnya sehingga dia bersama dengan keluarga besarnya pindah ke sini itu kalau tidak salah itu orang tunya adalah Pa woi woi yang meninggal di Jakarta itu karena riwayat dari mulut ke mulut bahwa karaeng segeri tidak membawa serta istrinya karena dalam keadaan hamil tua begitu lahir anaknya ada informasi dari Bone bahwa putranya karaeng segeri sudahhh lahiirr dia langsung memberikan nama bahwa inilah pa woi woi karaeng segeri jaadi Pa woi woi karaeng segeri itu tidak pernah melihat Segeri Cuma gelar yang diberikan oleh bapaknya yang berkuasa karena kebetulan berkuasa di Segeri tapi termasuk pejuang nasional dari Bone jadi disini seperti tempatnya itu maggiri itu anuu lompo Pa woi woi namanya sawah waktu sawah dulu itu ada keluarganya dulu pernah mencari kesini ke sini saya bilang jangan semua camat itu sudah bagi bagi dan dijual jadi tambak sekarang Anda korbankan pembelinya</p>

		<p>dia tidak salah semata mata dia hanya beli saja yang salah itu yang menjualnya hahah Cuma pejabat yang datang disi kan dulu banyak sekla tanah negara bahkan sepertinya iman desa ada dikasi sawah jabatan disini milik adat yahh karena disana sudah habis semua yahh ee waktu itu ditahun 63 naik tahun 70 semua pejabat desa diberi hak untuk apa namanya mendapatkan sawah jabatan di Jawa sampai sekatrang masih berlangsung itu itulah sekarang pemilihan kepala desa di Jawa mungkin seheboh bupati kalau disini karena sawah jabatannya disini juga ada dulu mungkin satu dua tahun dimiliki dijual sawah Pa woi woi itu dijual sama yang menajdi camat disini, iya kadang seperti kalau lomba desa di Tompo bulu diundang dia untuk anuu ee ditampilkan pakaian adatnya meskipun tidak magiri disana dia cuman ambil apa namanya ee tarian dan menggaru istilahnya mungkin ade-ade tau penyambutan keluarga raja kan sering, sering merke a diundang tahun kemarin dia dibiayai hampir 300 juga ke Papua ada seorang warga sini yang tinggal disana ingin menampilkan budaya ke sana ada sekitar 10 orang dan dikasi ampau pulang</p>
6	Mantan Pengurus Arajang (Masyarakat)	<p>Pak Making itu pemerintah sebenarnya tidka ada hubungan nya dengan bissu dengan arajang hanya petani saja, kalau pemberdayaannya bissu itu tidak na campurki pemerintah kalau mau turun sawa itu ji saja kegiatanna magiri</p>
7	Camat Segeri	<p>Pak Syahrul Jadi kegitaatanya yang terlibat dengan pemerintahan dengan masyarakat jadi kegiatan nya itu rutin setiap tahun dilaksanakan kalau mau turun sawah, itu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, kegiatan pemerintahan atau kegiatan kemasyarakatan kadang setiap setiap tahun dilaksanakan itu wajib, jadi mereka laksanakan itu ritual pada tahapan-tahapan setiap lima hari seblum tutun sawah itu dilaksanakan sampai satu minggu ahh itu paartisipasi masyarakat pemerintah untuk memberikan biaya pelaksanaan kegiatan</p>

4. Seperti apa orientasi praktis antara pemerintah dan bissu (Kolaborasi)

NO	INFORMAN	KOLABORASI
1	Ketua adat bissu	<p>Bissu Nani</p> <p>oooh magellomu na' kerja samana nakero kasi ku fura na fake bissue pada lisu bolana na renni doi. nee iyami ro degaga biaya na fura dibicarakang biasa iya murusukenggi pakkohe engka bituanna doi lessesi lao dialena jadi iyaro umpamana pammarenta de' masalah nasaba lima adannu seddi adanna pammarenta jadiki pammarentah mappakero ana' iyami na salah ku pangurusuna salah iyaro mai na laokku Cuma tambahan mi ku sappa</p> <p>ohh bagus nak kerjasamanya misallnya kalau saya sudah dipake mereka pada kembali ke rumahnya masing-masing dan mereka memberikan uang bayaran nya. tapi Cuma itu kendalanya tidak ada biaya yang sudah dibicarakan biasanya mereka yang engurus begini artinya ada uang tapi diambil alih oleh mereka jadi misalnyaa pemerintah tidak salah karena kita punya lima perkataan tapi pemerintah punya satu perkataan perkataan pemerintah yang akan menang begitulah nak biasanya terjadi kesalahakan kalau kalau pengurus nya lah yang salah itulah nak kepergian saya Cuma untuk mencari tambahan saja</p>
2	Perangkat Bissu	<p>Bissu Eka</p> <p>yaa, ee terutama untuk komunikasi alat pertanian, penentuan hari untuk bercocok tanah</p>
3	Perangkat Bissu	<p>Bissu Nisa</p> <p>Lao romai pammarentae molliki mabbisu taauwe lao pangkajenne,jumppandang, lao tega faa iyafa na jaji faa laoi na pitang ku engka mapakero</p>

		Pemerintah datang mengundang kami untuk mabbissu ke pangkajenne, makassar, atau ke mana karena untuk memperlihatkan kalau ada bissu
4	Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	A. Ali Baso Bombong Kalau seperti sekarang ini yang saya liat kalau pemerintah membutuhkan bissu yah baru datang tapi kalau tidak yahh tidak juga karena ini seperti yang saya katakan bahwa dia tidak ada untuk menunjang kehidupannya
5	Mantan Anggota DPR (Masyarakat)	H. Abu bakar sapa sepertinya tidak adda sinergitas karena itu dia berkomunikasi kalau mau turun sawah setelah itu kalau ada yang mengundang kalau ada keterkaitan dengan kebudayaan dia diundang dia hanya mau mengunggu undangan ataukah per orangan ada orang kawinan yang maau menampilkan budayanya disini diundang tersendiri baru dia diundang justru yang memanfaatkan dia banyak-banyak orang dari luar bilang kau dikasi Rp.100.000, Rp.200.000 tidur di hotel melati sudah merasa puas sekaali padahal yang memanggil dia itu jutaan iyaa saya pernah liat di bandara itu pemandu wisata begitu keluar aanak-anak yang pakaian baju bodo diusir masuk masuk masuk karena itu orang-orang belanda sudah mau berfoto bersama padahal mereka jual iyaa anak-anak tidak boleh kelura dulu sebelum ada perintah dari anunya ee pemandu wisata itu karena kan pemandu wisata ada nego dulu baru bisa dan promosikan tahun lalu itu bissu segeri di bandara kalau tahun ini tidak tau masih ada atau enda besar itu anunya kunjungilah Pangkep disana ada ini ada ini paling ditonjilkan itu Bissu segeri karena wisataewan dari luar itu banyak yang tau artinya artis dengan pemain bayaran
6	Mantan Pengurus Arajang (Masyarakat)	Pak Making disini tidak ituji saja anunya pemerintah disini kalau mau ma ppalili saja dibelikan kesempatan ma palili diberikan saja izin tidak ada begitu saja
7	Camat Segeri	Pak Syahrul

	Jadi begitu tadi saya bilang pemerintah tetap memperhatikan eee kepentingan-kepentingan yang akan dilaksanakan bisu memperhatikan fasilitas-fasiliitasnya orang-orang bisu tapi contoh saya bilang pemerintah sudah membangun tempat tinggal atau tempat rumah atau yang dibilang arajang jadii rumah arajang disana itu ditempatnya sudah ada dua, sudah ada dua karena itu yang satu sudah lama jadi pemerintah lagi mebangunkan satu tempat perumahan satu rumah yang ditempati setiapa ada kegiatan-kegiatan di Segeri
--	--

### E. Partisipasi Button Up

#### 5. Bagaimana partisipasi Bissu dalam penyelenggaraan pemerintahan

NO	INFORMAN	PARTISIPASI BISSU
1	Ketua adat bisu	<p>Bissu Nani</p> <p>tetapki na' tetapki maccoe anunna fammarentae biasana yakoo atau engka gubernur romai fole jakarta dijempuki atau elomi mappabotting aga farelui bisu pada diolini bisue dipadameni kada kira-kira na' siaga kemampuannu, de' naule pakei na' bisue ku de gaga doi nasaba alena engka maneng doi na runtutu pa macukuruni ma kindo bottinni iyahe di salaii jamangge</p> <p>Tetap nak mereka tetep ikut kegiatan pemerintah biasanya kalau ada biasanya kalau ada kegiatan pemerintah seperti kedatangan gubernur dari jakarta dijemput atau Cuma dengan acara pernikahan atau apa yang mau menggunakan bisu bisu akan dipanggil dan mereka akan ditanya kira-kira beraapa kekampuan mu bisu tidak bisa dipake nak kalau tidak ada uang karena mereka semua punya penghasilan dengan kerjaan mereka ada yang</p>

		menjadi tukang cukur ada yang menjadi perias pengantin dan pekerjaan mereka yang ditinggalkan
2	Perangkat Bissu	<p>Bissu Eka</p> <p>Banyak sekali partisipasinya bissu dalam pemerintahan termasuk penjemputan tamu kayak gubernur, presiden itu bissu terlibat terus ee ma pateddu ripa sakati acara-acara adat pangkep mereka terlibat sebagai pelaku upacara-upacara adat</p>
3	Perangkat Bissu	<p>Bissu Nisa</p> <p>lao mabissu ya ku naollika i nani ma ufe ku engka ta Rp.500.000 na reinngi lao jakarta iahh enjana mobbika denaa ku salaiki bolau iya makedda metokka enjaana mu ollika teana lao dena ku ullei, ya ku enka dalleku ennga meto tu menre dalleku romai, iyaro lao lao jakarta aga tega tumai na balu te roo kebudayaange na dena to gaga diruntu</p> <p>Kami ma bissu jika ammatoa Nani diundang untung kalau Rp.500.000 lah kami dapat ke jakarta misalnya kalau ada yang menundang saya sudah tidak mau pergi meninggalkan rumah saya saya sudah bilang sebelumnya, kalau saya punya rezeki, rezeki itu akan datang ke saya, misalnya ke Jakarta atau ke mana mereka jual kebudayaan dan tidak ada yang kami dapat</p>
4	Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	<p>A. Ali Baso Bombong</p> <p>partisipasinya seperti saya liat kaalau ada anuu seperti ada kunjungan kepala daerah kaalau tidak yah</p>
5	Mantan Anggota DPR (Masyarakat)	<p>H. Abu bakar sapa</p> <p>dia hanya ada kerja sama dengan pemerintah kalau mereka diundang dia apaa insitenti sifalnya yahh kegiatan yang kira-kira kalau dimunculkan dai ada daya tariknya</p>
6	Mantan Pengurus	Pak Making



	Arajang (Masyarakat)	ituji saja kalau mau turun sawa itu ji saja kegiatanna magiri
7	Camat Segeri	<p>Pak Syahrul</p> <p>Partisipasi penyelenggaraan pemerintah sebenarnya bissu nda terlibat kalau orientasi pemerintahan dia hanya melakukan ritual-ritual ataukah pemerintah bikin suatu kegiatan baru dilibatkan jadi keterlibatan dipemerintah pada saat tertentu, pada saat tertentu tidaak melaksanakan kegiatan-kegiatan selaluu mau dibilang mau melaksanakan kegiatan pemerintahan padahal enda, jadii bissu itu nanti dipake atau nanti diperlihatkan lagi kalau ada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sifatnya tingkat kabupaten atau provinsi</p>

#### F. Konsep Permusyawaratan

6. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kebudayaan tradisional ini seiring dengan perkembangan zaman?

NO	INFORMAN	KELESTARIAN KEBUDAYAAN
1	Ketua adat bissu	<p>Bissu Nani</p> <p>iye baa na' bertahan bissue nasaba iya ro ana' iya koe kacicemmi adakku lokka pada-padaku pa deto ku engka gosip ii de to nengka ku olliki ku salah-salah memenggi. Pareluki tu maseddi di bola rajangge aja lalo mu anu kupi d bola rajangge manre esso na rapiki wenni kupi d arajangge manre wenni de'togaga perhitungan waktunna eloki manre manreki supaya makessingi bissue lao diidi, agaro ku lokka di bolana pammatoa eloki minung wae pella na degaga eloki manre na de' gaga lokkami ma lupa, jadi ku engka romai pole wartawan elo mitta bissu ku eloka na pabbicara ka iyyo na' kira-kira mu areppa tu doi pabbarekke sumange makkutoi ha bissue apalagi pa matoa</p>

		<p>iya nak bissu tetap bertahan nak karena saya Cuma berkata satu kali saja kepada saudara-saudaraku karena saya tidak pernah menceritakan kejelekan mereka saya tidak pernah panggil jika mengenai hal yang salah atau kurang baik. kita perlu bersatu nak di rumah arajang biar kita makan siang di rumah arajang dan kalau kita dapat malam kita makan di arajang tidak ada perhitungan waktu kapan kalau kita mau kmakan kita makan supaya hubungan para bissu terjalin dengan baik dengan kita, apa yang saya dapatkan ketika ke rumah paammatoa kita mau minum air panas tapi tidak ada kita mau makan tapi tidak ada makanan kita Cuma datang kelaparan jadi kalau ada wartawan yang datang untuk meliput kira-kira berapa yang bisa kamu berikan untuk pammatoa</p>
2	Perangkat Bissu	<p>Bissu Eka</p> <p>sebenarnya untuk itu cara mengantisipasi saya tidak bisa tau bagaimana caranya karena ini tradisi atas kesadaranya sendiri kalau masalah campur tangan pemerintah, pemerintah juga tidak bisa membentuk bibit-bibit bissu, jadi pemerintah begitu jadi kalau memang terlalu dibutuhkan yahh dilirik lagi jadi hanya waktu-waktu tertentu jadi bissu itu maunya setiap bulan ada dari mereka setidak-tidaknya untuk pemeliharaan dan kehidupannya mereka bahasa kasarnya mungkin gajilah yang harus dikasi ke bissu walaupun misalnya tidak semua bissu bisa dikasi mungkin bissu-bisu tua atau tertentu yah setidak-tidaknya pimpinan saja yang tinggal di arajang yang serba kekurnagan disana</p>
3	Perangkat Bissu	<p>Bissu Nisa</p> <p>iya idi bissu ku engkasi romai tau marola laosi ma bissu de'gaga doina iyaro cau manekki ya ku engka de'nasiagna maegaki</p> <p>kami para bissu jika ada yang datang kemari mengundang kami pergi ma bissu tisak ada uangnya itulah yang mampuan kami lelah walaupun ada itu tidak seberapa</p>

4	Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	<p>A. Ali Baso Bombong</p> <p>sebaiknya itu harus bekerja sama dengan pemerintah tapi yahh gimana yaah jadi untuk ini tidak artinya lenyap ini tradisi kami dari masyarakat mempertahankan, dikasi pisang mita sumbangan jadi kalau dihari pasar pada waktu itu misalnya kalau kita mau turun mau diarak belum ada bahan kita ke pasar biasa ada kasi beras kasi minyak kelapa kita ambil semua karena itu kita butuhkan bukan hanya uang kadang-kadang terdesak baru pemerintah kasibantuan, tapi kalau saya liat tahun-tahun kemrin ini pemerintah membantu tidak tau yang akan dayang krena kemarin-kemarnya itu kita saja yang bangunkan</p>
5	Mantan Anggota DPR (Masyarakat)	<p>H. Abu bakar sapa</p> <p>kalau bertahan, sebetulnya tidak akan mati juga cuman dia tidak bisa besar kalau bertahan pasti bertahan karena ada saja pasti orang-orang belanda ada orang orang mau berkorban kepada dia kalau dia mau ambil program sarjananya kalau dia kan bawa penterjemah begini begini begini sehingga itu tidak bisa mati sebetulnya susah matikan dia karena yang kita lawan dunia iya kan yang yang susah untuk membesarkan sehingga mudah termanfaatkan oleh daerah andai kata jadi budaya muslim seperti di sunan anpel itu jalan masuk dari jalan raya itu bisa dipenuhi dengan penjual-jual jadi masyarakat tumbuh ekonominya kalau rame pengunjungnya seperti ini kuburannya Soekarno itu Cuma sekedar mau siarah Soekarno jadi kalau kita buat seperti itu disini pertumbuha ekonomi di daerah ini sudah bisa membantu lebih baik adri sekarang belum lagi wisatawan- wisatawan mancanegara itukan kalau ditambah daya tariknya itu pasti sebaiknya ini bekerja sama dengan pemerintah taapi untuk ini tidaakk artinya lenyap ini tradisi</p>
6	Mantan Pengurus Arajang (Masyarakat)	<p>Pak Making</p> <p>kalau ada gajinan nanti tidak hilang tapi kalau tidak ada gajina hilang semua itu nanti bissu, bissu tidak ada lagi sekarang sekarang tinggal 4 mi bissu di segeri kalau sedikit tidak dikasi gaji nanti ini karena tidak ada ongkosna</p>

7	Camat Segeri	<p>Pak Syahrul</p> <p>Jadi pemerintah tetapp mempertahankan bissu yang ada di Pangkep, jadi semua bissu bissu yang ada dari pemerintah tadi yang saya bilang tetap memprhatikan pelaksanaan-pelaksanaannya kalau akan dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, jadi tetap diperhatikan kebutuhan-kebutuhna yang digunakan bissu jadiiii eee pemerintah disini pemerintah dalam hal ini kepala dinas pariwisata yang menangani langsung bissu yang ada di segeri jadi dinas pariwisata tetap memberikan perhatian-perhatian kepada bissu tetap mencari dan piikah ketiga supaya kegiatan bissu ini rutin jika melaakukan ritual tarian kepada pihak ke tiga</p>
---	--------------	---

7. Apakah ada pro dan kontra terkait dengan adanya tradisi adat bissu sampai sekarang?

NO	INFORMAN	PRO DAN KONTRA
1	Ketua adat bissu	<p>Bissu Nani</p> <p>deto gaga na'</p> <p>tidak ada nak</p>
2	Perangkat Bissu	<p>Bissu Eka</p> <p>kalau pro dan kontra itu tidak ada dari dulu tidak ada pro dan kontra bissu juga tetap dilirik karena itu adalah asetnya juga pangkep dan bahkan dibeberapa buku-buku pemandu wisata itu dibuat pemerintah khusus untuk itu panduan pariwisata dan dia banyak berbicara tentang bissu</p>
3	Perangkat Bissu	<p>Bissu Nisa</p> <p>dena gaga masalah iyami diolo ro pammarentae elo na musnahkan bissue ne dena nullei musnahkanngi tetapki bertahang</p>

		tidak ada masalah cuman dulu pemerintah mau memusnahkan bissu tapi tidak bisa musnahkan bissu tetap bertahan
4	Pemangku adat Segeri (Masyarakat)	A. Ali Baso Bombong Kalau selama ini saya liat tidak ada kecuali kalau bissunya ini sedikit melenceng seperti eka itu pandai mencari uang melenceng dalam artian dia membawa proposal bilang mau begini—begini taaunya tidak ada dia yang ambil uang nya, ada orang barat masuk dia suruh dulu bayar sekian diantar ke kuburan atau ke mana melihat benda-benda kebesaran
5	Mantan Anggota DPR (Masyarakat)	H. Abu bakar sapa tidak sampai pro kontra
6	Mantan Pengurus Arajang (Masyarakat)	Pak Making tidak pernah kalau di segeri tidak pernah
7	Camat Segeri	Pak Syahrul kalau kita di Pangkep khususnyaa Segeri tidak ada kontradiksi karena kenapa pemerintah dan masyarakat butuh mereka kadang pemerintah dan masyarakat sangat membutuhkan namanya bissu karena ada ritual-ritual yang dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan selain bissu jadi pemerintah disini atau masyarakat tidak pernah kontrasiksi dengan orang-orang bissu

8. Apakah peran badan permusyawaratan daerah dalam meningkatkan partisipasi Bissu dalam pembangunan daerah?

NO	INFORMAN	PEMBANGUNAN DAERAH
1	Ketua adat bissu	<p>Bissu Nani</p> <p>iyaro sedding na' ku pada mabbicarai makessing mu padda makessing iyatommi ro baantungge de'gaaga tapi iya rodo ana' mattajekka umpamana tapi iya mancaji pammatoa na kaburang mua bolah arajang tapi iyami ro anre de' na sesuai adanna biasa, jadi pelang-pelang tokka maccarita lokka kantoroe sappa ku de' naurususangga alena meto madosa usalai kampokku demi alena. eee ana' adapngenna pole cappa aje lettu gemme iya magana paeng ajana ku pauii laona ada iya ku de' kulao sappa laleng atuokku mulle parekka siaga tauna ana' de muengka parengga berre mu' cilice jaadi ku de' ku assu aga elo ku anre moro jaa ee padecenggenngi arajatta</p> <p>itunak kalau mereka berbicara semua bagus cuman bantuan tidak ada tapi dulu nak saya menunggu misalnya tapi semenjak saya menjaadi pammatoa saya dibuatkan rumah arajang tapi Cuma makan nya saja tidak sesuai dengan perkataanya sebelumnya, jadi pelan-pelan saya berbicara ke kantor mencari kalau mereka tidak memproses janjinya yahh mereka sendirilah yang akan dapat dosa saya meninggalkan kampung halaman demi mereka. eee kan sayaa minta mita maaf dari ujung kaki sampi rambut jasi bagaimana dengan saya tidak usah saya ungkapkan kalau saya tidak pergi mecari untuk kehidupan bisakah engkau berikan sama sudah berapa tahun nak tidak pernah berikan saya beras walau satu biji pun jadii kalau saya tidak keluar apa yang saya makan saya tinggal merawat arajang kebudataan kita</p>
2	Perangkat Bissu	<p>Bissu Eka</p> <p>saya rasa tidak terlalu banyak kalau masalah itu Cuma kita tidak enak kalau bilang tidak ada krena dia bikin rumah</p>

		itu
3	Perangkat Bissu	<p>Bissu Nisa</p> <p>de' gaga perhaatianna pammarentae fa ngala talami bantuki fa ngala tala parekki fa engka na aseng na arekki tapi de'gaga lettu engka na aseng hadiana bissue ta sikohe naseng ta sitaung mappulo juta na de'gaga lettu</p> <p>Tidak ada perhatian pemerintah cuma Allah yang membantu kami mereka mengatakan ada yang mereka berikan tapi nyatanya tidak ada yang sampai katanya bissu punya hadiah segini per orang puluhan juta tapi tidak ada sampai</p>
4	Pemangku adat Segeri (Masyrakat)	<p>A. Ali Baso Bombong</p> <p>Bissu ini hanya digerakan dek misalnya ini ada keperluan pemerintah untuk dipake kalau untuk pembangunan-pembangunan lain saya liat jarang dilibatkan</p>
5	Mantan Anggota DPR (Masyrakat)	<p>H. Abu bakar sapa</p> <p>emmm tidak masuk dalam kategori mau dikembangkan hanya di bakeup kebutuhannya tidak ada niatan dari pemerintah untuk membesarkannya karena itu tadi jangan sampai kalau mau dibesarkan tanpa arah yang jelas saya belum pernah dengar itu karena yang dikembangan oleh pemerintah daerah hanya pariwisatanya seperti ada pulau anu disini yang dekat sedangkan yang ada ini pemerintah tidak sanggup karena tidak menghasilkan seperti anu ini setelah lewat tonasa tangga seribu pemerintah sudah biayai tapi merasa tidak ada hasilnya buang-buang uang saja sudah dipromosi diapa tapi tidak isa perlu itu dibina karena betul-betul dijadikan aset karena pengakuan dari raja-raja baik di Bone maupun disini dulu itu hanya perangkat perangkat apa namanya perangkat kerajaan bahasa bugisnya dia pa llapi aro pasukan inti karena dia terdiri dari orang-orang kebal karena dia selalu di ling satu kalau ada penampilan raja dulu pasukan pasukan biasa kan jauh kalau dia ii di ling satu dia sai memang diansalkan</p>

		tidak mempan dengan senjata tajam yaa kebal
6	Mantan Pengurus Arajang (Masyrakat)	Pak Making tidak pernah kalau disegeri kalau di kabupaten biasa juga kalau di segeri tidak ada, tidak diperhatikan sampai sekarang sedangkan pangkajenne saja tidak diperhatikan selalu dijanji-dijanji tapi tidak ada
7	Camat Segeri	Pak Syahrul Badan permusyawaratan daerah jadi badan permusyawaratan daerah ataukah lembaga pemberdayaan masyarakat desa tingkat kkabupaten tetap menspor bissu yang ada di Pangkep dan tetap memberikan kesempatan untuk bisa menghidupi bissu itu sendiri artinya disini selain bissu melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual di Pangkep mereka juga memberikan kesempatan bissu-bissu ini untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya ee ada sebagai tata rias, ada eee sebagai pedagang, ada juga yang sebagian kegiatannya, pokokny ada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh orang bissu. Kalau bantuan perekonomian tetap ada bantuan perokomian untuk khususnya di segeri pada umumbya Pangkep karena kenapa bissu itu bisa mendatangkan turis-turis luar negeri, eee bisa mendatangkan orang-orang lokal yang datang di Pangkep untuk melihat kegiatan-kegiatan bissu jadi sangat membantu perekonomian utamanya di Kecamatan Segeri.



## RIWAYAT HIDUP



Hasriati atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sry lahir di Bone, pada tanggal 02 Juni 1996. Anak kedua dari lima bersaudara lahir dari pasangan suami istri Malwani dan Haslindah. Bertempat tinggal di BTN Taeng Permai B1. No 1. Pada tahun 2003, peneliti mulai bersekolah di jenjang Sekolah Dasar yaitu di SD INP 10/73 Palattae dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kahu dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA N 1 Kahu pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Karena memiliki keinginan kuat dalam hal pendidikan peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, yang memiliki nomor instansi (0411) 866972 dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan nomor stambuk 105610533715. Pengalaman Organisasi yang pernah diikuti yakni masuk dalam keanggotaan PMR dan Remaja Mesjid di SMA N 1 Kahu dan Anggota UKM kampus yaitu LKIM-PENA dan IMM Sospol. Motto hidupnya "*Hidup adalah perjuangan, maka berjuanglah untuk menggenggam dunia*". Prestasi yang telah diraih yaitu sebagai Peserta Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional Pekan Ilmiah Kreativitas Remaja (PIKIR) Universitas Muhammadiyah Makassar padatahun 2016. Finalis Bidang Kajian Kawasan Pesisir Lomba Karya Tulis Ilmiah Kemaritiman Tingkat Nasional Universitas Hasanuddin Makassar Pada Tahun 2016. Semi Finalis Lomba Katya Tulis Ilmiah "*Innovaation Contest (ICON)*" Fakultas Ekonmmi Universitas Negeri Yogyakarta Padatahun 2017. Finalis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Kimia FMIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat Pada Tahun 2017. Finalis Lombamenulis Esai Nasinal 2017 "*Archipelago Essay Competition*" Pada Tahun 2018. Pserta Kongres Nasional Dan Rapat Kerja Nasioal ILP2MI (Ikatan Lembaga Penelitian Dan Penlaran Mahasiswa Indonesia) Pada Tahun 2018. Peserta Borneo *Internasional Yout Summit Essay Competition* UKM PP-FIM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Pada Tahun 2018.